

**ISU KORUPSI DALAM BINGKAI MEDIA:
ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN KASUS KORUPSI
MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO
PADA MAJALAH *TEMPO* DAN MEDIA *ONLINE TEMPO.CO*
EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2023**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Oleh

GILANG RIZKIAWAN

20321090

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ISU KORUPSI DALAM BINGKAI MEDIA:
ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN KASUS KORUPSI
MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO
PADA MAJALAH *TEMPO* DAN MEDIA *ONLINE TEMPO.CO*
EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2023**

Oleh:

GILANG RIZKIAWAN

20321090

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Tanggal: 2 Oktober 2025

Mengetahui

Dosen Pembimbing Skripsi



Narayana Mahendra Prastya, S.Sos, M.A

NIDN. 0520058402

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ISU KORUPSI DALAM BINGKAI MEDIA:
ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN KASUS KORUPSI
MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO
PADA MAJALAH *TEMPO* DAN MEDIA *ONLINE TEMPO.CO*
EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2023

Disusun oleh:
GILANG RIZKIAWAN

20321090

Telah Diuji dan disahkan oleh Dosen Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 9 Oktober 2025

Dosen Penguji :

Ketua : Narayana Mahendra Prastya, S.Sos, M.A ()
NIDN. 0520058402

Anggota : Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D ()
NIDN. 0506038201

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Dr. Zaki Habibi, M.Comms
NIDN. 0517078101

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gilang Rizkiawan
Nomor Mahasiswa : 20321090
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Budaya

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut:

1. Selama proses penyusunan skripsi ini, saya tidak melakukan pelanggaran akademik dalam bentuk apa pun, termasuk pada plagiarisme, penggunaan jasa penulisan karya ilmiah oleh pihak lain, atau bentuk pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan prinsip dan etika akademik yang dijunjung tinggi oleh Universitas Islam Indonesia.
2. Oleh karena itu, skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri sebagai penulis, dan bukan merupakan hasil plagiarisme atau karya milik pihak lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya dinyatakan lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa skripsi ini bukan merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, melainkan merupakan hasil plagiarisme atau karya milik pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Gilang Rizkiawan
20321090

MOTTO

“Strive for progress, not perfection.”

(David Perlmutter)

“Manners maketh man.”

(Kingsman: The Secret Service)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Orang tuaku dan kedua Abangku,

Keluarga besarku tercinta, serta

Keluarga besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, khususnya teman-teman
Angkatan 2020.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur tiada henti penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam turut dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Karya skripsi ini menjadi bentuk kewajiban penulis untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Penulis memberi judul skripsi ini “Isu Korupsi Dalam Bingkai Media: Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Pada Majalah *Tempo* Dan Media *Online Tempo.co* Edisi September-Oktober 2023”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak selama penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta, Jajang Sudrajat dan Ibunda tercinta, Tri Yuani Setyo Budiati, yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi tiada henti. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, atas segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, serta dukungan moril dan materil untuk menghantarkan penulis hingga ke titik ini.
2. Kedua abangku tersayang, Rahmat Akbar Ramdhoni dan Fachri Achmad Zulfikar, yang selalu menjadi teman diskusi, pemberi semangat, dan contoh panutan bagi penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan canda tawa di sepanjang perjalanan ini.
3. Kakak iparku yang baik hati, Intan Kumala Sona, terima kasih atas kehangatan, doa, dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga kami.
4. Keponakan kecilku tersayang, Hanindya Raisyana Fachrint, yang tawa dan kelucuannya selalu menjadi pelipur lara dan sumber kebahagiaan di tengah penatnya mengerjakan skripsi.
5. Prof. Dr. rer. soc. Masduki, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.
6. Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. Zaki Habibi, M.Comms., selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia.

8. Narayana Mahendra Prastya, S.Sos, M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendampingi dan memberikan bimbingan selama masa pengerjaan skripsi.
9. Nadia Wasta Utami, S.I.Kom., M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan akademik kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia atas kehangatan dalam memberikan ilmu dan membantu penulis menyelesaikan berbagai kendala selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman selama di bangku perkuliahan, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan motivasi yang diberikan selama masa perkuliahan.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, dan sebagai manusia, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan perkembangan kajian sangat dibutuhkan untuk ke depannya. Penulis berharap, karya skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan praktik maupun akademik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 15 Agustus 2025



Gilang Rizkiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Praktis	6
2. Manfaat Teoritis	6
E. Tinjauan Pustaka	6
1. Penelitian Terdahulu.....	6
2. Kerangka Teori.....	9
F. Metodologi Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	13
3. Narasumber atau Informan Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data	14
6. Unit Analisis.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	17
A. Deskripsi Umum	17
B. Media <i>Tempo</i>	18
1. Sejarah <i>Tempo</i>	18
2. Visi dan Misi <i>Tempo</i>	19

3.	Budaya <i>Tempo</i>	19
4.	Unit Bisnis dan Produk <i>Tempo</i>	20
5.	Struktur Organisasi <i>Tempo</i>	22
C.	Pemberitaan Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo	24
1.	Temuan Berita Majalah <i>Tempo</i>	24
2.	Temuan Berita Media Online <i>Tempo.co</i>	26
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....		29
A.	Analisis <i>Framing</i> Media Online <i>Tempo.co</i>	29
1.	Berita 13 Oktober 2023, Resmi, KPK Tahan Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta	29
2.	Berita 11 Oktober 2023, Syahrul Yasin Limpo Ajukan Gugatan Praperadilan Terhadap KPK, Sidang Digelar Akhir Oktober	32
3.	Berita 14 Oktober 2023, KPK Sebut Soal Aliran Miliaran Rupiah dari Syahrul Yasin Limpo, NasDem: Tidak Ada	36
4.	Berita 13 Oktober 2023, Jokowi: Penangkapan Syahrul Yasin Limpo oleh KPK Itu Proses Hukum	39
5.	Berita 13 Oktober 2023, Jokowi Tepis Isu Politisasi Kasus Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo	43
6.	Berita 12 Oktober 2023, NasDem Belum Akan Pecat Syahrul Yasin Limpo	47
B.	Analisis <i>Framing</i> Majalah <i>Tempo</i>	51
1.	Berita 15 Oktober 2023, KPK Tangkap Syahrul Yasin Limpo	51
2.	Berita 8 Oktober 2023, Isi Nasihat Hukum Febri Diansyah cs Agar Syahrul Yasin Limpo Bebas.....	54
3.	Berita 8 Oktober 2023, Syahrul Memeras, Syahrul Diperas. Mana yang Benar?	57
C.	Kebijakan Redaksi <i>Tempo</i> Dalam Pemberitaan Kasus Korupsi	60
D.	Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	64
BAB IV PENUTUP		67
A.	Kesimpulan	67
B.	Keterbatasan Penelitian	68
C.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN		74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Analisis <i>Framing</i> Entman.....	14
Tabel 1. 2 Perangkat <i>Framing</i> Entman	15
Tabel 1. 3 <i>Sampling</i> Berita Majalah <i>Tempo</i> dan Media Online <i>Tempo.co</i>	15
Tabel 2. 1 Berita Majalah <i>Tempo</i>	24
Tabel 2. 2 Berita <i>Tempo.co</i>	26
Tabel 3. 1 Analisis <i>Framing</i> Berita <i>Tempo.co</i> dengan Judul “Resmi, KPK Tahan Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta”	29
Tabel 3. 2 Analisis <i>Framing</i> Berita <i>Tempo.co</i> dengan Judul “Syahrul Yasin Limpo Ajukan Gugatan Praperadilan Terhadap KPK, Sidang Digelar Akhir Oktober”	32
Tabel 3. 3 Analisis <i>Framing</i> Berita <i>Tempo.co</i> dengan Judul “KPK Sebut Soal Aliran Miliaran Rupiah dari Syahrul Yasin Limpo, NasDem: Tidak Ada”	36
Tabel 3. 4 Analisis <i>Framing</i> Berita <i>Tempo.co</i> dengan Judul “Jokowi: Penangkapan Syahrul Yasin Limpo oleh KPK Itu Proses Hukum”	39
Tabel 3. 5 Analisis <i>Framing</i> Berita <i>Tempo.co</i> dengan Judul “Jokowi Tepis Isu Politisasi Kasus Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo”	43
Tabel 3. 6 Analisis <i>Framing</i> Berita <i>Tempo.co</i> dengan Judul “NasDem Belum Akan Pecat Syahrul Yasin Limpo”	47
Tabel 3. 7 Analisis <i>Framing</i> Berita Majalah <i>Tempo</i> dengan Judul “KPK Tangkap Syahrul Yasin Limpo”	51
Tabel 3. 8 Analisis <i>Framing</i> Berita Majalah <i>Tempo</i> dengan Judul “Isi Nasihat Hukum Febri Diansyah cs Agar Syahrul Yasin Limpo Bebas”	54
Tabel 3. 9 Analisis <i>Framing</i> Berita Majalah <i>Tempo</i> dengan Judul “Syahrul Memeras, Syahrul Diperas. Mana yang Benar?”	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo <i>Tempo</i>	18
-------------------------------------	----

ABSTRAK

Rizkiawan, G. 20321090 (2025). *Isu Korupsi Dalam Bingkai Media: Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Pada Majalah Tempo Dan Media Online Tempo.co Edisi September-Oktober 2023*. (Skripsi Sarjana). Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini mengkaji pembingkai media terhadap kasus korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menjadi sorotan publik pada tahun 2023. Media *Tempo* dipilih sebagai objek penelitian karena rekam jejaknya yang kuat dalam jurnalisme investigasi, independen, dan kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pisau analisis *framing* model Robert N. Entman dalam paradigma konstruktivisme. Data penelitian diperoleh melalui Majalah *Tempo* dan *Tempo.co* dengan pemberitaan pada edisi September-Oktober 2023 yang diseleksi berdasarkan kategorisasi tema sehingga menghasilkan sampel analisis berita berjumlah 9 berita, yakni 3 berita dari Majalah *Tempo* dan 6 berita dari *Tempo.co*. Selain itu, terdapat wawancara bersama Redaktur dan Jurnalis *Desk Hukum Tempo*, Riky Ferdianto yang dilakukan pada 25 Juni 2025. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kedua platform. *Tempo.co* membingkai isu secara reaktif sebagai tindakan hukum yang tegas oleh KPK. Sebaliknya, Majalah *Tempo* membangun *framing* yang lebih dalam dan sistemik, tidak hanya menyoroti korupsi SYL tetapi juga mengkritisi integritas lembaga penegak hukum dalam kasus ini dan adanya dugaan politisasi hukum. Perbedaan ini menegaskan bagaimana platform yang berbeda dalam satu media dapat menghasilkan konstruksi realitas yang beragam.

Kata kunci: Framing Media, Korupsi, Tempo, Syahrul Yasin Limpo

ABSTRACT

Rizkiawan, G. 20321090 (2025). Corruption Issues in the Media Frame: A Framing Analysis of the News Coverage of Minister of Agriculture Syahrul Yasin Limpo's Corruption Case in Tempo Magazine and Tempo.co Online Media (September-October 2023 Edition). (An Undergraduate Thesis). Communication Science Study Program, Faculty of Social and Cultural Sciences, Universitas Islam Indonesia.

This study analyzes the media framing of the corruption case involving the Minister of Agriculture, Syahrul Yasin Limpo (SYL), which captured public attention in 2023. Tempo Media was chosen as the object of this study due to its strong track record in investigative, independent, and critical journalism. This research uses a descriptive qualitative approach with Robert N. Entman's framing model as the analytical tool, within a constructivist paradigm. Research data was obtained thru Tempo Magazine and Tempo.co, with news coverage from the September-October 2023 editions selected based on thematic categorization, resulting in a sample of 9 news articles for analysis: 3 from Tempo Magazine and 6 from Tempo.co. Additionally, an in-depth interview was conducted on June 25, 2025, with Tempo's Law Desk Editor and Journalist, Riky Ferdianto. The research findings indicate a significant difference between the two platforms. Tempo.co framed the issue reactively as a matter of firm legal action by the KPK. Conversely, Majalah Tempo constructed a more in-depth and systemic framing, not only highlighting SYL's corruption but also critiquing the integrity of the law enforcement institution in this case and the alleged politicization of the law. This distinction highlights how different platforms within a single media group can produce diverse constructions of reality.

Keywords: Media Framing, Corruption, Tempo, Syahrul Yasin Limpo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, maraknya kasus korupsi yang terjadi membawa dampak yang sangat serius bagi kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan permasalahan yang terjadi secara global dan dapat meresap dengan cepat dengan efek yang sangat merugikan bagi stabilitas politik, kinerja perekonomian suatu negara, serta bentuk integrasi masyarakat (Sovianti, 2019). Berdasarkan rilis TI Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada 2022 menurun drastis dari skor 38 menjadi 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Peringkat Indonesia kini berada di posisi 1/3 negara paling korup di dunia dan Asia Tenggara, jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand.

Media massa sangat erat kaitannya dengan permasalahan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan media massa dianggap menjadi lembaga negara ke-empat setelah *trias politica* yang semestinya menjalankan peran ‘pengawasan’ dan ‘penyeimbang’ terhadap demokrasi sehingga dapat menjadi senjata utama dalam pemberantasan korupsi melalui liputan-liputannya (Abdullah & Permana, 2017). Peran ini menjadi krusial dalam kerangka demokrasi yang lebih luas. Sebagaimana ditegaskan oleh Transparency International Indonesia bahwa dalam kerangka demokratisasi mendalam ini, pers yang bebas dan mandiri merupakan persyaratan mutlak. Tanpa pers yang bebas, maka kelompok-kelompok sosial tidak akan mampu menyuarakan kepentingannya dan mempertahankan hak-haknya. Melalui pers, rakyat bisa meminta pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan (Trianita & Muzzammil, 2023). Namun faktanya, tren pemberitaan kasus korupsi di Indonesia sendiri belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pemberantasan kasus korupsi. Wijayanto (2009) mengatakan bahwa pada umumnya, media di Indonesia dalam memberitakan kasus-kasus korupsi baru sampai pada tahap *reporting on investigation* dan belum sampai dilakukannya tahap *investigative reporting*. Media massa di Indonesia kebanyakan memberitakan korupsi, kolusi dan kasus penyelewengan lainnya hanya berdasarkan pada laporan penyidikan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah lembaga penegak hukum dan bukan memberitakan kasus secara mendalam yang berdasarkan atas hasil investigasi mereka sendiri (Abdullah & Permana, 2017).

Korupsi dapat menjadi peluang tersendiri bagi media massa dalam memberitakan berita tersebut, menjadikannya berita terkini yang sekaligus ditampilkan sebagai tajuk utama dalam portal berita media itu sendiri. Ketika proses inilah, isu-isu atau permasalahan yang muncul akan diolah dan disajikan oleh media menjadi sebuah kasus atau peristiwa sesuai dengan sudut pandang yang telah terbentuk hingga menjadikannya sebagai tajuk utama. Media dalam melihat suatu kasus, isu, atau peristiwa tentu mempunyai makna atau persepsi tersendiri dan tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, dari sudut pandang pemberitaan, gaya penulisan berita, penafsiran kasus, dan konteksnya sehingga juga menimbulkan perbedaan pada kategorisasi hingga unsur yang terkandung dalam penulisan berita berdasarkan isu yang diangkat (Leliana dkk., 2021).

Korupsi saat ini merupakan sebuah aktivitas yang sangat merugikan namun telah menjadi hal biasa di berbagai kalangan. Hal tersebut terjadi silih berganti dari instansi satu ke instansi yang lain. Johannes Tanak selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 2.707 laporan dugaan korupsi pada triwulan I 2023 yang dimana laporan tersebut berasal dari sektor pemerintah (Rassat, 2023). Pada media massa, pemberitaan mengenai korupsi hampir dapat dilihat setiap hari dengan berbagai kasus. Dalam kasus ini peneliti akan membahas mengenai kasus korupsi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang juga menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dengan dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, tindak pidana pencucian uang, serta keikutsertaan dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian di era Pemerintahan Joko Widodo tersebut telah resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Oktober 2023 lalu. Menurut penyidik KPK, dugaan total dana yang diselewengkan dan telah diterima oleh Syahrul Yasin Limpo berkisar Rp. 13,9 miliar. Selain itu, Syahrul juga diduga telah membuat kebijakan secara personal dengan meminta setoran para ASN (Aparatur Sipil Negara) eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian. Tindakan tersebut tidak dijalankan oleh SYL seorang diri, ia dibantu oleh dua orang anak buahnya, yakni Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono. Keseluruhan uang yang disetorkan kepada SYL digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya seperti pembayaran cicilan kartu kredit, pembayaran cicilan mobil Toyota Alphard, renovasi rumah, perjalanan keluar negeri, perobatan hingga perawatan wajah yang ditaksir hingga milyaran rupiah. Hal tersebut tentu saja dinilai sangat tidak lazim bagi seorang Menteri

Pertanian yang seharusnya menaungi serta memberikan kenyamanan bagi para pegawai di lingkup Kementerian Pertanian. Namun, yang terjadi berbanding terbalik, dimana SYL melakukan pemerasan dalam jabatan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yasin Limpo tentu saja menjadi hal yang sangat merugikan bagi negara maupun masyarakat. Korupsi semacam ini dapat mencoreng citra dan eksistensi birokrasi Republik Indonesia, terlebih lagi dapat menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat terhadap integritas dan transparansi lembaga-lembaga pemerintah. Di tengah kondisi pertanian di Indonesia yang masih sedang tidak baik-baik saja dan bahkan saat ini Indonesia sedang dilanda krisis talenta muda yang bergerak di sektor pertanian, seharusnya Kementerian Pertanian yang menjadi nahkoda perlu fokus terhadap hal tersebut untuk membawa arus perkembangan bagi sektor pertanian di Indonesia. Namun yang terjadi sebaliknya, Kementerian Pertanian justru membelot dan mengarahkan kapalnya ke dalam pusaran sehingga menyebabkan lenyapnya tujuan dari institusi itu sendiri hingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dari hal tersebut dapat dilihat secara seksama bahwa pemimpin memiliki arus yang sangat besar atas apa dan siapa yang dipimpinnya. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kinerja kepemimpinan sangat bergantung pada kualitas dan kapabilitas sang pemimpin.

Di Indonesia, masalah korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan kalangan atas lainnya berulang kali menjadi tajuk utama di media massa cetak dan media massa digital. Korupsi di kalangan pejabat pemerintah yang selalu menjadi tajuk utama di media massa menegaskan bahwa korupsi adalah bagian dari patologi sosial masyarakat Indonesia dan perlu diberantas secara lebih serius melalui jalur hukum, agama, dan sosial budaya. Di sisi lain, masalah ini sulit dilacak dan dideteksi secara empiris karena korupsi “tertutupi” oleh keterkaitan kepentingan antara pelaku dan sistem pemerintahan yang berlangsung (Ananda dkk., 2019). Pemberitaan mengenai kasus korupsi ini menjadi sangat relevan karena informasi yang diberikan oleh media massa akan membentuk opini dan persepsi masyarakat terhadap masalah korupsi dan integritas pemerintahan.

Tempo melalui salah satu produk medianya, yaitu Majalah *Tempo*, menuliskan tentang kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo pertama kali pada tanggal 1 Oktober 2023 dengan judul berita “Syahrul Yasin Limpo Tersangka Gratifikasi” yang seterusnya juga dilaporkan melalui portal berita *online Tempo.co*. Tidak hanya *Tempo*, media massa lain pun juga turut serta memberitakan kasus ini. Dengan banyaknya pemberitaan dan

pembahasan yang telah beredar mengenai permasalahan korupsi yang menyeret Syahrul Yasin Limpo tentu saja akan mempengaruhi partisipasi dari masyarakat yang berperan sebagai konsumen media.

Pemilihan *Tempo* sebagai objek dalam penelitian ini mempunyai alasan yang kuat. Media ini memiliki rekam jejak yang kuat dalam liputan investigasi, salah satunya terkait kasus korupsi. *Tempo* tidak hanya menjadi pionir tetapi juga cukup konsisten dalam menginformasikan dan mengungkap berbagai kasus korupsi besar di Indonesia, baik yang melibatkan tokoh politik, pejabat publik, sektor pemerintahan maupun swasta. Menurut Natalia (2019), media seperti *Tempo* memiliki peran strategis dalam mengawal kasus-kasus korupsi di Indonesia karena kemampuannya dalam menghadirkan berita yang faktual dan dapat dipercaya. Selain terkenal dengan jurnalisme investigasinya, *Tempo* juga dikenal sebagai media yang independen dan kritis terhadap pemerintah. Majalah ini masih mendukung politik Soeharto di awal masa kepemimpinannya, tetapi semakin lama artikel-artikel yang diterbitkan *Tempo* memuat tulisan-tulisan yang semakin kritis (Keller, 2009). Bahkan akibat dari kritiknya yang tajam, *Tempo* sampai mengalami dua kali pembredelan pada masa orde baru, tepatnya pada tahun 1982 dan 1994 (Deha & Syas, 2021). Sementara itu, independensi media *Tempo* dipengaruhi adanya budaya perusahaan dan otonomi redaksi yang berbeda daripada media lainnya berdasarkan wawancara dengan wartawan *Tempo* yang diungkap oleh Keller (2009). *Tempo* berhasil menerapkan self-regulation alias lepas dari intervensi kepemilikan media. Kepemilikan bersifat publik dan tidak terpusat sehingga karyawan media *Tempo* turut berpartisipasi dalam menentukan struktur media, tidak hanya menerima atau diatur oleh pemilik media. *Tempo* sebagai media massa yang juga sebagai sebuah industri, ternyata tidak sepenuhnya tunduk pada kepentingan ekonomi dan politik. Mereka memiliki posisi tawar politik yang cukup signifikan dibanding media massa lain (Nurhajati & Wijayanto, 2019).

Media massa memiliki peran sentral yang tidak hanya sebatas penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk pengetahuan dan konstruksi realitas sosial-politik bagi masyarakat. Melalui proses seleksi dan penonjolan isu, media pada dasarnya memiliki kekuatan untuk menentukan bukan hanya *apa* yang publik pikirkan, tetapi juga *bagaimana* cara memikirkannya. Kekuatan inilah yang memungkinkan media untuk membingkai sebuah peristiwa, menonjolkan aspek-aspek tertentu, dan pada akhirnya mempengaruhi persepsi, opini, serta sikap publik terhadap suatu masalah yang tidak mereka alami secara langsung. Pada era digital saat ini, di mana informasi diakses

utamanya melalui gawai yang terhubung internet, peran pembingkai ini menjadi semakin kuat karena kecepatan dan jangkauannya yang masif.

Media massa terkadang mengindikasikan atau memberikan santiran mengenai ideologi yang diusungnya secara tersirat, terlebih lagi pada saat adanya keberpihakan media terhadap pemilik modal. Informasi yang disajikan media tentunya memiliki tujuan komersial, politik, dan ideologi. Dalam hal pencapaian tujuan, media dapat membingkai berita untuk mempengaruhi pemikiran pembaca dan membuat pembaca membentuk opini yang sesuai dengan tujuan media, hal itulah yang disebut dengan *framing*. Media massa yang menyoroti kasus panas seperti kasus korupsi akan menunjukkan kekuatannya yang mampu untuk menggiring dan mengubah opini dari publik mengenai yang bersangkutan. Pada kasus korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kasus dan pemberitaan yang beredar di media khususnya pada Majalah *Tempo* dan *Tempo.co* dengan analisis *framing* sehingga judul yang dirumuskan pada penelitian ini adalah “Isu Korupsi dalam Bingkai Media: Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Majalah *Tempo* dan Media Online *Tempo.co* Edisi September-Oktober 2023”.

B. Rumusan Masalah

Korupsi telah menjadi sebuah permasalahan yang terjadi di hampir setiap negara yang tidak hanya berdampak bagi pemerintahan, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat. Media memiliki peran yang strategis dalam memberantas korupsi. Dengan menjalankan fungsinya sebagai 'pengawas' yang dapat membantu mengungkap praktik korupsi melalui liputannya. Salah satu peristiwa korupsi yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Oleh karena itu, menjadi relevan untuk meneliti bagaimana media berita seperti *Tempo*, yang dikenal kritis dan investigatif, mengemas dan menyajikan kasus ini kepada publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Majalah *Tempo* dan Media Online *Tempo.co* membingkai dan mengonstruksi pemberitaan mengenai kasus korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo?”.

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah disusun diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembingkai dan konstruksi pemberitaan oleh *Tempo* mengenai kasus korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melalui dua produk media mereka.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi khalayak tentang bagaimana sebuah media mengemas suatu berita.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan disiplin ilmu komunikasi dalam kajian media dan jurnalistik.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menghasilkan penelitian baru yang berbasis analisis *framing* model Robert N. Entman.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Hendra Setiawan dan Neng Tika Harnia (2021) dengan judul Analisis *Framing* Pemberitaan Vonis Koruptor pada Media Online *Suara.com* dan *Kompas.com* menemukan bahwa perbedaan yang terlihat sangat kontras dari pemberian judul pada berita dengan topik bahasan yang sama. Pada media *Kompas.com* jurnalis menggunakan kata-kata yang lebih halus sehingga cenderung tidak mengundang kontroversi dan pada harian tersebut jurnalis lebih mengutamakan fakta yang ada di lapangan, sedangkan pada media *Suara.com* jurnalis lebih cenderung menggunakan judul dengan pemilihan kata yang sarkas. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa setiap media memiliki ideologi yang berbeda dalam melakukan *framing* dalam beritanya.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Maura Frilicia Van Yusat & Hendra Setiawan (2022) yang berjudul Analisis *Framing* Berita Pegawai Pajak Korupsi Pada Surat Kabar *Kompas.com* dan *Detikfinance* dapat diketahui bahwa media digital *Kompas.com* lebih layak dijadikan sebagai panutan dalam penulisan berita karena seleksi dan pemilihan kata pada pemberitaannya dinilai profesional.

Sedangkan pada portal berita *Detikfinance*, dinilai melibatkan bumbu-bumbu gimik dalam penggunaan diksi pada penulisan berita yang disajikan sehingga dapat menarik publik untuk konsumsi berita tersebut. Bumbu gimik dalam sebuah berita yang dipublikasi bisa saja akan menarik jumlah pembaca namun dapat juga berdampak fatal pada opini dan pola pikir masyarakat terhadap suatu pemberitaan atau kasus tertentu.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Hildansyah, dkk (2022) dengan judul *Ketua KPK dalam Bingkai Media Pada Kasus Korupsi Gubernur Papua Di Media CNNIndonesia.com dan Detik.com membahas tentang framing kasus korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam media online CNNIndonesia.com dan Detik.com dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis model analisis framing Robert Entman*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *CNN Indonesia.com* dan *Detik.com* sama-sama membingkai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melanggar standar etika penegakan hukum. Temuan data menunjukkan pertemuan Firli Bahuri dengan Lukas Enembe, tersangka korupsi, lebih santer diberitakan dibandingkan hasil dari pertemuan tersebut. Alhasil, Firli Bahuri digambarkan sebagai sosok yang memberikan keistimewaan kepada Lukas Enembe, tersangka korupsi. Rubrik pemberitaan tentang Lukas Enembe beserta kasusnya dan kondisi kesehatannya cukup minim ditampilkan dibandingkan pemberitaan pertemuannya dengan Firli Bahuri. Hanya *CNNIndonesia.com* yang memberitakan informasi klarifikasi KPK soal keterlibatan Firli Bahuri, sedangkan *Detik.com* tidak memuat informasi klarifikasi keterlibatan langsung Ketua KPK tersebut.

Keempat, artikel jurnal berjudul *Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Menteri Kominfo Johny G. Plate* yang ditulis oleh Agung Pangeran Bungsu dan Fohan Muzakir (2023) dengan metode penelitian kualitatif dan model analisis *framing*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jurnalis memberitakan kasus korupsi Menteri Kominfo aktif. Dari hasil *framing* yang dilihat menggunakan dua perangkat *framing*, yaitu *define problems* dan *diagnose cause*, didapati bahwa pemberitaan digambarkan dengan gaya dan ciri khas yang berbeda oleh dua media yang menjadi objek penelitian pada artikel jurnal ini. Selanjutnya, peneliti menggunakan *moral judgement* untuk dapat menarik nilai moral dalam pemberitaan, yang ditutup dengan *treatment recommendation* sebagai rekomendasi dari upaya yang meyakinkan khalayak bahwa pemberitaan

dari laman berita tersebut disampaikan secara benar dan diyakini atas kebenarannya.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Tasya Lee Maharani dan Nawiroh Vera (2023) dengan judul *Framing Analysis of the Suspected Corruption Case of Agriculture Minister Syahrul Yasin Limpo*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *Detik.com* menggambarkan berita tentang kasus korupsi yang dicurigai SYL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berita yang dimuat oleh *Detik.com* menampilkan keseriusan yang dilakukan KPK dalam menyelidiki dan menindaklanjuti kasus korupsi SYL serta pentingnya mengatasi korupsi dalam institusi-institusi pemerintah.

Terakhir, artikel jurnal yang ditulis Sopian Tamrin, Fadhillah Sri Meutia, dan Imam Malik Riduan (2024) dengan judul *Framing Analysis of Syahrul Yasin Limpo Corruption Case in Online Media*. Penelitian ini bertujuan memetakan keragaman pembingkai di empat media online terkemuka, yaitu *Detik.com*, *Kompas.com*, *Liputan6.com*, dan *CNBC Indonesia*. Temuan utamanya menunjukkan bahwa setiap media memiliki bingkai yang khas: *Detik.com* menonjolkan drama sensasional, *Kompas.com* cenderung faktual dan netral, *Liputan6.com* memberi ruang pada pembelaan SYL, sementara *CNBC Indonesia* mengambil pendekatan investigatif dengan merinci pelanggaran yang ada. Penelitian ini berhasil menyajikan gambaran umum tentang bagaimana media-media arus utama membingkai kasus korupsi SYL secara beragam.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah di paparkan di atas, terdapat beberapa hal yang belum terdapat pada penelitian terdahulu tersebut dan dapat menjadi aspek kebaruan yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini. Pertama, belum ada penelitian yang secara spesifik dan mendalam menganalisis bagaimana Majalah *Tempo* dan *Tempo.co* membingkai kasus ini sekaligus bagaimana perbandingan satu media yang sama, namun melalui platform yang berbeda sehingga dapat ditemukan dari penelitian ini. Kedua, terdapat celah pada kedalaman analisis isu. Penelitian sebelumnya pada kasus SYL cenderung menyimpulkan bingkai media seputar ketegasan KPK atau keragaman pendekatan seperti drama sensasional dan faktual. Penelitian ini berupaya menggali lebih dalam untuk melihat apakah *Tempo* hanya membingkai kasus ini sebagai masalah korupsi individu atau bahkan bisa lebih luas, sebuah sudut

pandang yang belum secara eksplisit menjadi fokus pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai kasus ini.

2. Kerangka Teori

a. Media dalam Pemberantasan Korupsi

Media massa memegang peranan penting dalam masyarakat modern, khususnya dalam konteks demokrasi dan transparansi. Menurut sebuah studi oleh Norris (2006), media berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi, membantu memastikan akuntabilitas pejabat publik. Senada dengan yang dipaparkan oleh Norris (2006) dalam studinya yang berjudul *The Role of the Free Press in Promoting Democratization, Good Governance and Human Development*, Natalia (2019) juga menyampaikan bahwa media massa memiliki peran penting sebagai pilar keempat demokrasi dengan tugas utama sebagai pengawas terhadap mereka yang memegang jabatan publik.

Peran fundamental ini ditegaskan dalam buku saku yang diterbitkan oleh Transparency International Indonesia, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan semangat menjaga independensi, media menjadi pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Media berperan mengawasi, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja, serta memberi kritikan terhadap para pejabat negara ini agar memberikan pelayanan publik yang maksimal (Trianita & Muzzammil, 2023). Dengan demikian, dalam konteks pemberantasan korupsi, media memiliki fungsi kritis sebagai pengawas publik, edukasi publik, dan agen perubahan sosial. Di Indonesia sendiri, sudah sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga era reformasi beragam media, baik media cetak, televisi, dan media sosial telah menjadi elemen penting dalam mengungkap dan memerangi praktik korupsi (Sumarkidjo, 2013).

Media sebagai *watchdog* berperan untuk mengungkap berbagai penyelewengan dalam bentuk korupsi dan berbagai jenis pelanggaran lainnya. Segala usaha yang dilakukan media memberikan dampak nyata dan tidak nyata kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kualitas publik, serta membantu membangun kredibilitas media (Natalia, 2019). Selain itu, media sebagai *watchdog* melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemerintah sehingga dapat membantu masyarakat untuk menilai

kinerja pemerintah (Natalia, 2019). Hal tersebut dibuktikan dengan laporan dari Transparency International (2009) yang menyebutkan bahwa akses informasi yang diberikan oleh media membantu masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah hingga menekan praktik korupsi.

b. Manajemen Redaksi Media

Manajemen redaksi media merupakan salah satu aspek kunci dalam industri media. Sebuah prinsip dasar dari manajemen redaksi itu sendiri, yakni berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dan konten untuk mencapai tujuan editorial. Prosesnya melibatkan pengorganisasian, perencanaan dan pengendalian sumber daya dalam jajaran redaksi organisasi media untuk menghasilkan konten berkualitas yang memenuhi kebutuhan khalayak. Dalam lingkungan media yang terus berkembang, manajemen redaksi yang efektif menjadi semakin penting. Menurut Picard dan Lowe (2016), peran manajemen redaksi adalah memastikan operasional editorial berjalan lancar, mematuhi standar jurnalistik, dan konsisten dengan tujuan strategis organisasi.

Dalam manajemen redaksi tentunya juga diperlukan struktur organisasi yang jelas untuk menjamin alur kerja redaksional yang efektif (Susilo, 2020). Pengorganisasian yang baik membantu pembagian tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan kualitas konten anda. Pengambilan keputusan dalam manajemen redaksi terbagi dalam penentuan topik berita, liputan dan proses penyuntingan atau editorial, yang melibatkan pertimbangan berbagai faktor seperti nilai jurnalistik, kebutuhan khalayak dan konteks sosial politik. Sebagaimana diungkapkan Rahardjo (2019), keputusan editorial tidak hanya didasarkan pada fakta tetapi juga konteks dan dampak sosial dari berita yang dimuat.

Pada konteks media modern yang ditandai dengan adanya konvergensi, tantangan manajemen redaksi menjadi semakin kompleks karena harus mengelola dua alur kerja yang logikanya sangat berbeda antara platform daring dan luring. Menurut Jenkins (2006), konvergensi ini mendorong jurnalis menjadi *multi-skilled*, namun secara paradoks juga menciptakan budaya kerja yang berbeda. Ruang redaksi media online beroperasi dengan asas kecepatan dan kebaruan, di mana berita dirilis secara berkelanjutan tanpa

henti (Ward, 2002). Sebaliknya, ruang redaksi media offline bekerja menggunakan analisis dan kedalaman, disertai dengan proses verifikasi berlapis dan penyajian laporan yang komprehensif.

Perbedaan juga terdapat pada interaksi audiens dan format penyajian. Media online bersifat interaktif dan interkoneksi tanpa batas (Trianton, 2016). Lebih lanjut bahwa media online mampu menyajikan konten multimedia yang kaya. Di Indonesia, fenomena ini ditegaskan oleh Santana K. (2017), dimana media online sering difungsikan sebagai garda depan untuk berita cepat, sementara media offline diposisikan sebagai produk unggulan yang menawarkan analisis mendalam yang tidak tersaji pada versi online.

c. Analisis *Framing*

Analisis *framing* merupakan sebuah pendekatan mengenai analisis wacana versi terbaru yang secara khusus digunakan untuk menganalisis teks media. Selain itu, analisis *framing* juga digunakan sebagai sebuah media perangkat atas kepercayaan yang digunakan untuk mengorganisir pandangan politik, wacana, kebijakan, serta menyediakan kategori secara standar untuk mengapresiasi realitas yang dimaknai sebagai struktur konseptual dari *framing* itu sendiri. Selanjutnya bahwa penjelasan mengenai analisis *framing* dikembangkan melalui proses penyeleksian untuk dapat dilakukan penggambaran atau penyorotan aspek khusus dalam realitas media (Nurhadi, 2015). Analisis *framing* secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) dibingkai oleh media (Eriyanto, 2021:3). Media menggunakan suatu '*framing*' tertentu juga untuk merepresentasikan nilai, ideologi, dan kepentingannya dalam mengkonstruksikan realitas berita.

Frame berarti "mengapa dalam suatu peristiwa ada sesuatu yang ditonjolkan, tapi, ada juga yang dihilangkan". Oleh sebab itu, surat kabar tidak menyajikan segala sesuatu dengan mentah atau apa adanya, tapi, peristiwa dikonsentrasikan sedemikian rupa sehingga menjadi sajian berita yang menarik dan variatif. Surat kabar dalam melakukan penonjolan pada suatu peristiwa harus cermat, mengena dan tepat. *Framing* bukan mempertanyakan apa yang diberitakan surat kabar dalam suatu peristiwa,

melainkan bagaimana suatu peristiwa tersebut dibingkai, atau mana yang ditonjolkan dan dilupakan (Yogadiasti & Nazaruddin, 2008).

Pada dasarnya *framing* (pembingkai) adalah sebuah instrumen metodologis yang melibatkan identifikasi dan penilaian untuk melihat cara media memilih elemen tertentu untuk disorot dalam mengkonstruksi sebuah wacana dan realitas sosial sehingga menjadi berita. Penelitian oleh Kusuma (2017) tentang *framing* media massa di Indonesia menemukan bahwa *framing* digunakan untuk membentuk persepsi publik tentang isu-isu politik dan sosial.

Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan analisis *framing* yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Alasannya, pertama, dengan empat perangkat utama yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgments*, dan *treatment recommendation*, analisis *framing* Entman memberikan kerangka yang jelas untuk mengevaluasi bagaimana suatu isu dihadirkan dan dimaknai oleh media. Kedua, relevan dalam penelitian media karena membantu mengidentifikasi dan mengeksplorasi bias serta strategi komunikasi yang digunakan oleh media. Selain itu, pendekatannya tidak hanya berfokus pada konten tekstual tetapi juga mempertimbangkan konteks politik dan sosial di balik penyajian berita sehingga dapat membantu penulis melihat bagaimana media *Tempo* membingkai isu korupsi, dan bagaimana *framing* tersebut mempengaruhi persepsi publik. Terakhir, teknik analisis ini telah banyak diakui dan validitasnya telah terbukti dalam berbagai penelitian akademik sehingga penggunaannya memberikan landasan teori yang kuat dan kredibel.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian yang berjudul *Isu Korupsi dalam Bingkai Media: Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo* pada Majalah *Tempo* dan Media Online *Tempo.co* Edisi September-Oktober 2023 ini akan menggunakan metode analisis *framing* Entman dan menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk memahami suatu fenomena

tertentu. Fenomena tersebut dapat berupa sesuatu yang dialami oleh subjek, seperti tingkah laku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, yang digambarkan secara holistik dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan keadaan natural. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif diolah dengan metode kualitatif dan dilakukan analisis data secara induktif, yang hasilnya berfokus pada makna (Fiantika dkk., 2022:5).

Dalam mengangkat masalah bagi penelitian ini, peneliti mengamati keseluruhan kasus untuk memahami konteks, dinamika, dan semua faktor yang mempengaruhi. Sementara, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjadi salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dalam penelitian serta terkontrol atas dasar empiris.

Selain itu, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini. Paradigma konstruktivis memandang realitas sosial sebagai hasil dari konstruksi, sehingga dapat dikatakan hal tersebut bukan realitas yang alami (Eriyanto, 2021). Paradigma ini juga menekankan suatu realitas yang ada terbentuk ke dalam konstruksi mental yang beragam, didasari oleh beberapa aspek seperti pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, serta bergantung pada pihak yang melakukan hal tersebut (Meilasari & Wahid, 2020).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada periode Januari-Maret 2024, tepatnya pada masa masa pengerjaan tugas akhir skripsi dalam Semester Genap TA. 2023/2024 dengan mengacu pada Majalah *Tempo* dan Media Online *Tempo.co* Edisi September-Oktober 2023.

3. Narasumber atau Informan Penelitian

Narasumber atau informan yang diwawancarai pada penelitian ini adalah tim redaksi *Tempo*. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi terkait kebijakan redaksi *Tempo* secara umum dan proses dalam liputan berita, terutama pemberitaan mengenai kasus korupsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Dokumen. Data berupa pemberitaan mengenai kasus korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang dimuat pada Majalah *Tempo* dan Media Online *Tempo.co* Edisi September-Oktober 2023.
- b. Wawancara. Melakukan wawancara dengan tim redaksi *Tempo*.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah bentuk upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengorganisasikan data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan pemilahan untuk mendapatkan data inti yang dapat diolah sehingga menghasilkan sebuah hasil penelitian yang kredibel. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis *framing* model Robert N. Entman, digunakan untuk menganalisis bagaimana media massa membingkai isu korupsi. Analisis *framing* model Robert N. Entman dapat membantu peneliti dalam menarasikan penelitian yang didasari atas konsepsi *framing* Entman, yakni pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi pada suatu wacana guna membentuk kerangka berpikir tertentu.

Menurut Entman (1993), *framing* adalah proses memilih beberapa aspek dari suatu realitas yang dianggap penting dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi, untuk mempromosikan definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan/atau rekomendasi penyelesaian masalah tertentu. Dalam Er-iyanto (2021), terdapat dua dimensi besar terhadap *framing* oleh Entman, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek dari sebuah realitas. Istilah penonjolan dimaksudkan agar informasi terlihat jelas, bermakna, dan mudah diingat oleh khalayak.

Tabel 1. 1 Analisis *Framing* Entman

Dimensi	Keterangan
Seleksi isu	Aspek ini terkait dengan pemilihan fakta. Ada proses seleksi sehingga tidak semua aspek ditampilkan.
Penonjolan aspek	Aspek ini terkait dengan penulisan fakta. Penulisan untuk menampilkan aspek yang dipilih, berkaitan dengan penggunaan kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu.

Framing adalah suatu pendekatan yang bertujuan mengetahui cara pandang wartawan dalam menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang yang mempengaruhi penentuan fakta, mana yang ditampilkan dan mana yang dihilangkan serta seperti apa arah beritanya (Eriyanto, 2021). Lebih lanjut Eriyanto (2021) juga menyebutkan perangkat *framing* dalam model analisis *framing* Robert N. Entman, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Perangkat *Framing* Entman

Perangkat <i>Framing</i>	Keterangan
<i>Define problem</i> atau Pendefinisian masalah	Melihat suatu peristiwa apakah bersifat negatif atau positif.
<i>Diagnose causes</i> atau Memperkirakan masalah atau sumber masalah	Menilai subjek atau objek yang dianggap sebagai masalah.
<i>Make moral judgement</i> atau Membuat keputusan moral	Menilai atas penyebab permasalahan tersebut terjadi.
<i>Treatment recommendation</i> atau Menekankan penyelesaian	Menawarkan solusi dan memprediksikan hasil atas solusi tersebut.

6. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini diambil dengan proses *sampling* berdasarkan kategorisasi tema dari seluruh berita yang telah ditemukan pada Majalah *Tempo* dan Media Online *Tempo.co* mengenai Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo selama periode September-Oktober 2023. Periode September-Oktober 2023 dipilih karena pada masa tersebut menjadi titik puncak dari penyidikan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo, yang disampaikan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga kasus ini banyak diliput oleh media. Selain itu, kasus ini juga memantik diskusi publik pada masa tersebut.

Berdasarkan *sampling* yang telah dilakukan sehingga menghasilkan sejumlah berita yang akan dianalisis sebagai berikut:

Tabel 1. 3 *Sampling* Berita Majalah *Tempo* dan Media Online *Tempo.co*

Tema Berita	Sampel Judul Berita Majalah <i>Tempo</i>	Sampel Judul Berita Media Online <i>Tempo.co</i>
1. Penangkapan	KPK Tangkap Syahrul Yasin Limpo	Resmi, KPK Tahan Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta
2. Pembelaan dari kubu SYL (dari pribadi, partai)	a. KPK Tangkap Syahrul Yasin Limpo b. Isi Nasihat Hukum Febri Diansyah cs	a. Syahrul Yasin Limpo Ajukan Gugatan Praperadilan Terhadap KPK, Sidang Digelar Akhir Oktober

	Agar Syahrul Yasin Limpo Bebas	b. KPK Sebut Soal Aliran Miliaran Rupiah dari Syahrul Yasin Limpo, NasDem: Tidak Ada
3. Sikap pemerintah dan partai politik	Syahrul Memeras, Syahrul Diperas. Mana yang Benar?	a. Jokowi: Penangkapan Syahrul Yasin Limpo oleh KPK Itu Proses Hukum b. Jokowi Tepis Isu Politisasi Kasus Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo c. NasDem Belum Akan Pecat Syahrul Yasin Limpo

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberitaan tentang kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo dibingkai oleh media, khususnya Majalah *Tempo* dan Media Online *Tempo.co*, dalam rentang waktu September hingga Oktober 2023. Kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo menjadi salah satu isu yang menarik perhatian publik Indonesia pada tahun 2023 dikarenakan latar belakangnya yang menempati posisi strategis sebagai Menteri Pertanian, kasus ini tidak hanya berdampak pada citra pemerintah tetapi juga menimbulkan perdebatan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, teori analisis *framing* digunakan sebagai kerangka teoritis untuk memahami bagaimana *Tempo* membingkai aspek-aspek tertentu dalam narasi yang berkaitan dengan kasus ini.

Dalam konteks ini, media memainkan peranan penting dalam penyampaian berita yang dapat memengaruhi bahkan membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu publik, termasuk kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Pendekatan dan perspektif pemberitaan yang digunakan oleh *Tempo* dapat terlihat dalam pemberitaannya sehingga menjadi menarik untuk diteliti, mengingat reputasinya sebagai media investigatif yang dikenal kritis terhadap isu-isu korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* dengan data berupa artikel dan laporan berita tentang kasus dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo dari *Majalah Tempo* dan *Tempo.co*. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi elemen *framing* sehingga dapat membantu memperlihatkan pemaknaan realitas dibalik berita, termasuk menilai aspek hukum, politik, sosial, atau ekonomi dalam pemberitaan kasus ini.

Dari analisis berita-berita yang diterbitkan oleh *Tempo*, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana media *Tempo* membingkai dan mengonstruksi berita terkait kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana pengaruh media dalam membentuk persepsi dan opini publik terhadap isu korupsi. Penelitian ini dapat berguna bagi pembaca yang ingin memahami bagaimana isu korupsi

diberitakan oleh media di Indonesia serta selalu bersikap kritis terhadap media dan informasi yang dikonsumsi.

B. Media *Tempo*

1. Sejarah *Tempo*



Gambar 2. 1 Logo Tempo

Dilansir dari laman resmi *Tempo* Media Group, yakni *tempo.id*, Majalah *Tempo* didirikan pada tahun 1971 setelah perundingan antara enam wartawan, yaitu Goenawan Mohamad, Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, Usamah, dan Christianto Wibisono, bersama Ciputra, pendiri Yayasan Jaya Raya, dan Eric Samola, sekretaris yayasan tersebut. Rapat berlangsung di kantor Ciputra di Proyek Senen dan dilanjutkan hingga malam di rumah Ciputra di Slipi, Jakarta Barat. Hasil pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan majalah *Tempo* dengan modal dari Yayasan Jaya Raya.

Pada Februari 1971, *Tempo* merilis edisi perkenalan tanpa tanggal, dengan sampul bertajuk "Tragedi Minarni dan Kongres PBSI." Kemudian, edisi pertama resmi terbit pada 6 Maret 1971 dengan judul sampul "Film Indonesia: Selamat Datang, Sex." Dalam edisi awal ini, Yayasan Jaya Raya dan Jaya Press terdaftar sebagai penerbit.

Tiga tahun kemudian, pada 4 Februari 1974, Yayasan Jaya Raya dan PT Pikatan mendirikan PT Grafiti Pers, di mana sahamnya dimiliki bersama. PT Pikatan dibentuk untuk memberikan kesempatan kepada karyawan *Tempo* memiliki saham. Sejak itu, PT Grafiti Pers tercatat sebagai penerbit majalah *Tempo*. Edisi-edisi awal majalah ini menyajikan artikel tentang seni, gaya hidup, dan perilaku, memberikan nuansa yang baru dan segar meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanannya.

Pada tahun 1982, majalah *Tempo* pertama kali dibredel karena dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru dan Partai Golkar terkait Pemilu 1982. Pembredelan kedua terjadi pada 21 Juni 1994 oleh Menteri Penerangan Harmoko

karena majalah ini mengkritik Habibie dan Soeharto terkait pembelian kapal bekas dari Jerman Timur. Setelah Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, para mantan karyawan *Tempo* mengadakan diskusi untuk memutuskan apakah majalah ini perlu diterbitkan kembali. Mereka sepakat untuk kembali menerbitkan majalah *Tempo*, dan pada 6 Oktober 1998, majalah ini kembali hadir di bawah PT Arsa Raya Perdana.

Untuk memperluas bisnisnya, pada tahun 2001, PT Arsa Raya Perdana *go public* dan berubah nama menjadi PT *Tempo* Inti Media, Tbk., menggunakan dana dari hasil tersebut untuk menerbitkan Koran *Tempo*.

2. Visi dan Misi *Tempo*

Lebih lanjut, dilansir dari laman *tempo.id*, visi *Tempo* adalah menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan.

Sementara itu, misi *Tempo* mampu menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda; menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan berpegang pada kode etik; menjadi tempat kerja yang sehat dan menyejahterakan serta mencerminkan keragaman Indonesia; memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan; menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, intelektual, dan dunia bisnis melalui peningkatan ide-ide baru, bahasa, dan tampilan visual yang baik; dan menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multimedia dan pendukungnya.

3. Budaya *Tempo*

Masih dari laman resmi *tempo.id*, terdapat sebuah nilai-nilai sebagai bentuk penerapan budaya perusahaan di *Tempo* yakni terpercaya, merdeka, dan profesional. Terpercaya diartikan menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan konsistensi. Merdeka adalah memberikan ruang untuk kebebasan, berfikir, dan berekspresi. Sedangkan profesional adalah memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya.

4. Unit Bisnis dan Produk Tempo

Berdasarkan laman resmi *tempo.id*, Tempo memiliki unit bisnis dan produk media lainnya di bawah naungan *Tempo Media Group*. Unit bisnis dan produk media tersebut adalah sebagai berikut:

a. Majalah *Tempo*

Majalah *Tempo* merupakan produk utama *Tempo* sejak didirikan. Majalah ini terbit secara mingguan yang berfokus pada jurnalisme investigasi, laporan mendalam, dan analisis berita terkini. Majalah *Tempo* telah dikenal dengan suguhan laporan berita atau liputan yang kritis serta secara berani mengangkat isu-isu sensitif, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Selain tersedia dalam versi cetak, Majalah *Tempo* juga hadir dengan format digital.

b. Koran *Tempo*

Koran *Tempo* merupakan sebuah koran harian yang menyajikan berita aktual dengan pendekatan mendalam dan kritis mengenai politik, ekonomi, bisnis, olahraga, dan hiburan. Sama halnya dengan Majalah *Tempo*, Koran *Tempo* juga tersedia dalam format digital, memudahkan pembaca untuk mengakses berita secara online.

c. *Tempo English*

Tempo English merupakan referensi bacaan dengan sajian berita-berita politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia, regional, serta dunia dalam Bahasa Inggris. Produk ini membantu memudahkan pembaca internasional, diplomat, dan para investor asing untuk mengikuti perkembangan dinamika politik dan ekonomi Indonesia.

d. *Tempo.co*

Tempo.co merupakan portal berita online sebagai bagian dari digitalisasi *Tempo*. *Tempo.co* menyuguhkan sajian berita aktual secara cepat yang mencakup berbagai topik seperti politik, ekonomi, internasional, dan hiburan, serta menyediakan konten multimedia seperti video dan foto. Platform ini melayani pembaca yang mencari informasi secara daring.

e. *Tempo Data Science*

Tempo Data Science adalah unit bisnis yang berfokus pada bidang *big data*, *data science*, dan indeks ekonomi politik. Unit ini membantu perusahaan, organisasi, dan media mengolah hasil riset dan analisis data yang berguna dalam pengambilan keputusan strategis. *Tempo Data Science* mengemban tanggung jawab untuk mengelola seluruh data Grup *Tempo Media* berupa teks, foto, video, dan grafis sejak 1971 hingga sekarang.

f. *Tempo Institute*

Tempo Institute merupakan lembaga pelatihan jurnalistik di bawah naungan *Tempo Media Group*. Lembaga ini menghadirkan pelatihan berupa simulasi, praktik lapangan, dan magang di Grup *Tempo* serta pendampingan dan mentoring intensif dari wartawan-wartawan senior *Tempo*. *Tempo Institute* juga bekerja sama dengan berbagai institusi untuk meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia.

g. *Impresario – Matair*

Impresario – Matair merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang industri kreatif dan produksi multimedia. Unit ini berfokus pada produksi konten visual untuk komunikasi pemasaran di berbagai platform, mulai dari cetak, multimedia, digital, dan media sosial. Sebagai anak usaha *Tempo Media Group*, *Impresario-Matair* memiliki keunggulan sumber daya produksi yang andal dan berpengalaman dalam mengelola media serta event organizer.

h. *Temprint & Temprint Inti Niaga*

Temprint merupakan percetakan yang pertama kali beroperasi pada 1978 dengan komitmen memberikan layanan berkualitas tinggi untuk berbagai kebutuhan, termasuk majalah, buku, koran, dan produk cetak lainnya. Sementara, *Temprint Inti Niaga* adalah anak usaha dari *Temprint* yang berdiri sejak 2013. Perusahaan ini, bergerak di bidang perdagangan umum yang berfokus pada pengadaan kertas. Selain itu, *Temprint Inti Niaga* juga bertanggung jawab dalam distribusi dan pemasaran produk cetak *Tempo Media Group*, seperti majalah dan buku, ke berbagai titik distribusi di seluruh Indonesia, termasuk gerai retail, toko buku, dan pelanggan korporasi.

5. Struktur Organisasi *Tempo*

Berdasarkan Laporan Tahunan PT. Tempo Inti Media Tbk. 2023, struktur organisasi *Tempo* terdiri dari nama-nama dan jabatan sebagai berikut:

a. PT. *Tempo Inti Media Tbk*

- i. Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Goenawan Mohamad
Komisaris : Ir Kristianto Indrawan
Komisaris : Bambang Harymurti
Komisaris Independen : Ir Leonardi Kusen, M.B.A
Komisaris Independen : C. Paul Tehusijarana
- ii. Komite Audit
Ketua : Ir. Leonardi Kusen, M.B.A
Anggota : C. Paul Tehusijarana, Herry Hernawan
- iii. Komite Nominasi Dan Remunerasi
Ketua : Ir. Leonardi Kusen, M.B.A
Anggota : Ir Kristianto Indrawan, Jajang Jamaludin
- iv. Direktur Utama : Arif Zulkifli
- v. Sekretaris Korporat : Jajang Jamaludin
- vi. Audit Internal : Lanang Kharisma Perdana
- vii. Departemen Percetakan, Departemen Multimedia, Departemen Layanan Bisnis, Departemen Digital dan Usaha Rintisan

b. Majalah *Tempo*

Pemimpin Redaksi : Setri Yasra

Pemimpin Eksekutif : Bagja Hidayat

- i. *Desk Nasional Dan Hukum*
Kepala : Stefanus Pramono
Redaktur Utama : Mustafa Silalahi, Raymundus Rikang
Redaktur : Riky Ferdianto, Husein Abri Dongoran
Staff Redaksi : Egi Adyatama, Fajar Pebrianto, Francisca Christy Rosana
- ii. *Desk Ekonomi Dan Bisnis*
Kepala : Fery Firmansyah

Redaktur : Retno Sulistyawati, Khairul Anam, Aisha Shaidra

iii. *Desk Internasional Dan Wawancara*

Kepala : Kurniawan

Redaktur : Abdul Manan

iv. *Desk Kolom*

Kepala : Dodi Hidayat

v. *Desk Seni Dan Selingan*

Kepala : Seno Joko

Redaktur Utama : Nurdin Kalim

Staff Redaksi : Dian Yuliasuti

Reporter : Yosea Arga Pramudita

vi. *Desk Investigasi*

Redaktur : Erwan Hermawan

c. ***Tempo.co (PT. Info Media Digital)***

Direktur Utama : Wahyu Dhyatmika

Direktur : Y. Tomi Aryanto, Ade Liesnasari, Handy Dharmawan

Pemimpin Redaksi : Anton Aprianto

Redaktur Eksekutif : Anton Septian

Kordinator Kanal : Vertikal Anton Septian

i. *Desk Nasional Dan Hukum*

Kepala : Juli Hantoro

Redaktur : Linda Novi Trianita, Amirullah, Eko Ari Wibowo,

Febriyan

Staff Redaksi : Julnis Firmansyah

Reporter : Eka Yudha Saputra, Ade Ridwan Yandwiputra, Tika Ayu,

Ima Dini Shafira

ii. *Desk Ekonomi Dan Bisnis*

Kepala : Rr. Ariyani

Redaktur : Agung Sedayu, Martha Warta Silaban

Staff Redaksi : Ali Akhmad Noor Hidayat

Reporter : Moh. Khoiry Alfarizi, Riani Sanusi Putri, Riri

Rahayuningsih, Amy Heppy, Amelia Rahima Sari

- iii. *Desk Internasional*
Kepala : Dewi Rina
Redaktur : Daniel A Fajri
- iv. *Desk Sains, Sport Dan Otomotif*
Kepala : Nurdin Saleh
Redaktur : Sunudyantoro, Devy Ernis, Rina Widiastuti, Wawan Priyanto
Staff Redaksi : Erwin Prima, Arkhelaus Wisnu
Reporter : Dicky Kurniawan, Randy Fauzi Febriansyah
- v. *Desk Metro*
Kepala : Zacharias Wuragil
Redaktur : Clara Maria Tjandra Dewi
Staff Redaksi : Ahmad Faiz, Lani Diana, Muhammad Iqbal
Reporter : M. Faiz Zaki, Mutia Yuantisya, Desty Luthfiani
- vi. *Desk Gaya Hidup. Seleb. Travel Dan Difabel*
Kepala : Istiqomah Hayati
Redaktur : Mitra Tarigan
Staff Redaksi : Ninis Chairunnisa, Mila Novita, Cheta Nilawaty, Yunia Pratiwi
Reporter : Marvela

C. Pemberitaan Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo

Identifikasi pemberitaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo pada Majalah Tempo dan Media Online Tempo.co selama Periode September-Oktober 2023 yang mencakup judul, tanggal terbit, letak halaman, serta narasumber yang muncul dalam teks berita sebagai berikut:

1. Temuan Berita Majalah *Tempo*

Tabel 2. 1 Berita Majalah *Tempo*

No	Judul berita	Tanggal, bulan, tahun terbit	Letak halaman	Narasumber yang ada pada berita tersebut
1	Syahrul Yasin Limpo Tersangka Gratifikasi	1 Oktober 2023	Rubrik Nasional	- Juru Bicara KPK, Ali Fikri - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali
2	Syahrul Memeras, Syahrul Diperas. Mana yang Benar?	8 Oktober 2023	Laporan Utama	- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo - Juru Bicara KPK, Ali Fikri

				- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sekaligus Mantan Menteri Pertanian Tersangka Kasus Korupsi, Syahrul Yasin Limpo (SYL) - Pengacara Direktur Penyelidikan KPK, Rahmat Mulyana - Anggota Tim Kuasa Hukum SYL, Febri Diansyah - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Ade Safri Simanjuntak
3	Apa Saja Cabang Kasus yang Menyeret Syahrul Yasin Limpo	8 Oktober 2023	Laporan Utama	- Juru Bicara KPK, Ali Fikri - Plt. Deputy Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu - Petinggi Kementerian Pertanian (Menolak Menyebutkan Nama)* - Mantan Menteri Pertanian Tersangka Kasus Korupsi, Syahrul Yasin Limpo (SYL) - Penegak Hukum di KPK (Tanpa Adanya Nama/Inisial) - Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho
4	Isi Nasihat Hukum Febri Diansyah cs Agar Syahrul Yasin Limpo Bebas	8 Oktober 2023	Laporan Utama	- Juru Bicara KPK, Ali Fikri - Tim Kuasa Hukum SYL, Febri Diansyah - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali
5	Strategi Febri Diansyah cs Membebaskan Syahrul Yasin Limpo	8 Oktober 2023	Laporan Utama	- Tim Kuasa Hukum SYL, Febri Diansyah
6	KPK Tangkap Syahrul Yasin Limpo	15 Oktober 2023	Rubrik Nasional	- Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata - Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni - Mantan Menteri Pertanian Tersangka Kasus Korupsi,

				Syahrul Yasin Limpo (SYL)
7	Modus Dugaan Pencucian Uang Syahrul Yasin Limpo	22 Oktober 2023	Rubrik Hukum	- Kuasa Hukum SYL, Ervin Lubis - Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata - Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana - Ketua Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem & Pemilik PT. Oti Eya Abadi, Ahmad Ali - Pemilik CV. Hakaloka, Hendra Putra - Sekretaris PT. Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana - Pemilik PT. RRB, Yanti

2. Temuan Berita Media *Online Tempo.co*

Tabel 2. 2 Berita Media *Online Tempo.co*

No	Judul berita	Tanggal, bulan, tahun terbit	Narasumber yang ada pada berita tersebut
1	KPK Geledah Rumah Dinas Mantan Syahrul Yasin Limpo, SYL Tengah Berada di Spanyol	28 September 2023	- Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri - Kepala Bagian Humas Kementerian Pertanian, Arief Cahyono - Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu
2	Perjalanan Kasus Syahrul Yasin Limpo: Pernah Diperiksa KPK hingga Rumah Dinas Digeledah	29 September 2023	- Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu - Juru Bicara KPK, Ali Fikri - Mantan Menteri Pertanian Tersangka Kasus Korupsi, Syahrul Yasin Limpo (SYL) - Kepala Bagian Humas Kementerian Pertanian, Arief Cahyono
3	Transaksi Syahrul Yasin Limpo Diduga Capai	5 Oktober 2023	- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

	Ratusan Miliar, Kebanyakan Setoran Tunai		(PPATK), Ivan Yustiavandana - Penegak Hukum (Tanpa Adanya Nama/Inisial)
4	KPK Cegah Syahrul Yasin Limpo Hingga Cucunya ke Luar Negeri, Diduga Terima Rp 4,9 Miliar	7 Oktober 2023	- Juru bicara KPK, Ali Fikri - Penegak Hukum (Tanpa Adanya Nama/Inisial)
5	Ini Rincian Uang yang Disita dari Rumah Syahrul Yasin Limpo	10 Oktober 2023	- Juru Bicara KPK, Ali Fikri - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Mantan Menteri Pertanian Tersangka Kasus Korupsi, Syahrul Yasin Limpo (SYL)
6	Syahrul Yasin Limpo Ajukan Gugatan Praperadilan Terhadap KPK, Sidang Digelar Akhir Oktober	11 Oktober 2023	- Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto - Kuasa Hukum SYL, Ervin Lubis
7	KPK Telah Tetapkan Syahrul Yasin Limpo Beserta 2 Anak Buahnya Sebagai Tersangka	11 Oktober 2023	- Juru Bicara KPK, Ali Fikri - Kuasa Hukum SYL, Ervin Lubis - Penegak Hukum (Tanpa Adanya Nama/Inisial)
8	Syahrul Yasin Limpo Ajukan Praperadilan, KPK: Jangan Modus Hindari Penyidikan	11 Oktober 2023	- Juru Bicara KPK, Ali Fikri - Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto
9	KPK Ungkap Modus Syahrul Yasin Limpo dalam Dugaan Korupsi di Kementan	12 Oktober 2023	- Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak - Direktur Alat Mesin Pertanian di Kementerian Pertanian, Muhammad Hatta
10	KPK Ungkap Syahrul Yasin Limpo Gunakan Uang Saweran untuk Bayar Kartu Kredit Anak Cucu	12 Oktober 2023	- Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak
11	NasDem Belum Akan Pecat Syahrul Yasin Limpo	12 Oktober 2023	- Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni - Juru Bicara KPK, Ali Fikri - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh
12	IM57+ Nilai Penangkapan Syahrul Yasin Limpo oleh KPK Drama Penegakan Hukum	13 Oktober 2023	- Ketua IM57+ Institute, M. Praswad Nugraha - Juru Bicara KPK, Ali Fikri
13	Jokowi: Penangkapan Syahrul Yasin Limpo oleh KPK Itu Proses Hukum	13 Oktober 2023	- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo - Tim Kuasa Hukum SYL, Febri Diansyah - Juru Bicara KPK, Ali Fikri

14	Reaksi IM57+ Institute dan Kuasa Hukum soal KPK Tangkap Syahrul Yasin Limpo	13 Oktober 2023	- Ketua IM57+ Institute, M. Praswad Nugraha - Tim Kuasa Hukum SYL, Febri Diansyah - Juru Bicara KPK, Ali Fikri
15	Jokowi Tepis Isu Politisasi Kasus Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo	13 Oktober 2023	- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin - Tim Kuasa Hukum SYL, Febri Diansyah - Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera
16	Resmi, KPK Tahan Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta	13 Oktober 2023	- Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata
17	KPK Sebut Soal Aliran Miliaran Rupiah dari Syahrul Yasin Limpo, NasDem: Tidak Ada	14 Oktober 2023	- Ketua DPP Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi - Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata
18	Kronologi Kasus Syahrul Yasin Limpo: Sempat Hilang Kontak, Ditangkap KPK, Kontroversi Firli Bahuri Teken Penangkapan	14 Oktober 2023	- Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu - Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri - Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni - Mantan Menteri Pertanian Tersangka Kasus Korupsi, Syahrul Yasin Limpo (SYL) - Kuasa Hukum SYL, Ervin Lubis - Mantan Penyidik KPK, Novel Baswedan - ICW (Indonesian Corruption Watch) - Penegak Hukum (Tanpa Adanya Nama/Inisial)

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan penggunaan tabel *framing* Entman beserta hasil analisis *framing* pemberitaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo pada Media Online *Tempo.co* dan Majalah *Tempo*.

A. Analisis *Framing* Media Online *Tempo.co*

1. Berita 13 Oktober 2023, Resmi, KPK Tahan Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta

Tabel 3. 1 Analisis *Framing* Berita *Tempo.co* dengan Judul “Resmi, KPK Tahan Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta”

Perangkat <i>framing</i>	<i>Frame</i>	Letak
<i>Define problems</i>	KPK melakukan penahanan terhadap SYL dan anak buahnya.	Judul Paragraf 1 (Lead) Paragraf 2
<i>Diagnose causes</i>	SYL ditetapkan sebagai tersangka karena membuat kebijakan untuk menarik pungutan hingga setoran dari ASN di Kementerian Pertanian.	Paragraf 4 Paragraf 5 Paragraf 6 Paragraf 7
<i>Make moral judgement</i>	SYL menggunakan uang korupsi untuk kepentingan pribadi. SYL juga memerintahkan penyaluran uang untuk kepentingan Partai NasDem.	Paragraf 8 Paragraf 9
<i>Treatment recommendation</i>	Dasar KPK melakukan penahanan karena SYL merupakan tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Jeratan pasal berlapis UU Tipikor dan UU TPPU.	Paragraf 1 (Lead) Paragraf 2 Paragraf 3 Paragraf 10

Deskripsi *Framing*

a. *Define Problems*

Elemen *define problems* pada analisis model Entman berikaitan dengan temuan masalah serta bagaimana media menyajikan suatu peristiwa sebagai masalah, masalah apa yang ditekankan, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Masalah yang didefinisikan dalam berita ini adalah tindakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi dengan pemilihan fakta dilakukannya penangkapan dan penahanan oleh KPK. Selain itu, pendefinisian masalah juga menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan korupsi yang terstruktur karena dilakukan lebih dari satu orang dalam lembaga tinggi pemerintahan. Teks berita ini menonjolkan isu sebagai sebuah tindakan yang sudah terjadi dan efektif, bukan lagi sekadar wacana melalui frasa “resmi menahan” dan “ditahan 20 hari pertama”. Kemudian, penjelasan penempatan penahanan resmi dengan penggunaan frasa “Rutan KPK” memberikan penekanan eksekusi hukum yang konkret. Penonjolan isu juga dengan foto Syahrul Yasin Limpo tiba di Gedung KPK dengan dikawal penyidik usai dijemput paksa yang digunakan sebagai gambar utama dalam berita ini.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “KPK resmi menahan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)... Keduanya merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi...”
- 2) “SYL dan MH masing-masing ditahan 20 hari pertama... di Rutan KPK.”

b. *Diagnose Causes*

Diagnose causes berkaitan dengan media mengarahkan siapa atau apa yang dianggap bertanggung jawab atas masalah dari sebuah kasus yang diberitakan, baik secara langsung (aktor) maupun sistemik (struktur). Penyebab masalah diidentifikasi pada inisiatif dan instruksi aktif dari SYL sendiri. Seleksi isunya adalah perintahnya kepada bawahan untuk mengumpulkan uang dan sumber dana dari anggaran yang telah dinaikkan. Isu ini ditonjolkan dengan mengutip langsung pernyataan Wakil Ketua KPK yang menjadi otoritas tertinggi dalam kasus ini. Penonjolan melalui beberapa penggalan teks, seperti “SYL menginstruksikan KS dan MH...” yang menempatkan SYL sebagai aktor utama, serta penyebutan jumlah pungutan “USD 4 ribu sampai USD 10 ribu”. Sementara frasa “dengan paksaan” menonjolkan sifat otoriter dan eksploitatifnya tindakan yang dilakukan oleh SYL.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “SYL dengan jabatannya membuat kebijakan yang di antaranya melakukan pungutan...”
- 2) “SYL menginstruksikan KS (Kasdi Subagyo) dan MH menarik sejumlah uang... dengan bentuk paksaan,’ kata Alex...”
- 3) “...berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di dinaikkan atau mark up.”

c. *Make Moral Judgement*

Elemen ini berkaitan dengan penilaian moral yang disisipkan oleh media terhadap masalah atau pihak-pihak yang terlibat, bisa secara implisit atau eksplisit. Penilaian moral negatif terhadap SYL dikonstruksi melalui seleksi isu adalah penggunaan uang yang bersifat konsumtif, hedonis, dan politis, digunakan untuk keperluan pribadi dan dana untuk partai. Penonjolan isu dalam penilaian moral ini sangat terlihat dengan detail penggunaan uang untuk “perawatan wajah” dan “cicilan Alphard” beserta frasa “menikmati uang” dan “kepentingan pribadinya” menciptakan kontras tajam antara penggunaan uang untuk keperluan pribadi dengan status bahwa uang tersebut sebagai milik rakyat. Kemudian secara visual juga memberikan penonjolan paling kuat dengan foto penjemputan paksa yang merepresentasikan seseorang yang jatuh, bersalah, dan kehilangan kekuasaan sebagai citra moral seorang pesakitan.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “SYL gunakan uang hasil korupsi untuk kepentingan pribadinya.”
- 2) “...pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Toyota Alphard, perbaikan rumah pribadi... hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga...”
- 3) “...untuk kepentingan partai NasDem dengan nilai miliaran rupiah.”
- 4) Foto penangkapan SYL yang dikawal penyidik KPK.

d. *Treatment Recommendation*

Rekomendasi penyelesaian tentang bagaimana masalah diselesaikan atau langkah-langkah yang sebaiknya diambil, yang tersaji pada teks berita. Seleksi

isu pada rekomendasi penyelesaian masalah dalam berita ini adalah SYL merupakan tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian sehingga dilakukan penahanan. Fakta yang dipilih adalah status hukum formal sebagai tersangka, pasal pidana berlapis terkait korupsi & pencucian uang, dan nilai kerugian awal yang konkret. Penonjolan isu masalah ini dengan penggunaan istilah-istilah hukum yang tegas melalui diksi seperti, “tersangka”, “dijerat dengan Pasal...” serta penyebutan Pasal UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, penonjolan juga dengan menjelaskan kronologi penangkapan “KPK menangkap Kasdi Subagyo pada Rabu, sementara Syahrul Yasin Limpo sendiri ditangkap pada Kamis” yang menunjukkan proses hukum berjalan secara runtut.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Keduanya merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.”
- 2) “Dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan 12B... juncto Pasal 55...”
- 3) “KPK juga menjerat SYL dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.”
- 4) “KPK telah menangkap Sekjen Kementan Kasdi Subagyo pada Rabu... Syahrul Yasin Limpo sendiri ditangkap oleh KPK pada Kamis kemarin...”

Berita ini menjadikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata sebagai satu-satunya narasumber, dimana penjelasan serta kutipan langsungnya berjumlah enam paragraf. Foto Syahrul Yasin Limpo tiba di Gedung KPK dengan dikawal penyidik usai dijemput paksa menjadi gambar utama yang digunakan dalam berita ini.

2. Berita 11 Oktober 2023, Syahrul Yasin Limpo Ajukan Gugatan Praperadilan Terhadap KPK, Sidang Digelar Akhir Oktober

Tabel 3. 2 Analisis *Framing* Berita *Tempo.co* dengan Judul “Syahrul Yasin Limpo Ajukan Gugatan Praperadilan Terhadap KPK, Sidang Digelar Akhir Oktober”

Perangkat <i>framing</i>	<i>Frame</i>	Letak
--------------------------	--------------	-------

<i>Define problems</i>	SYL mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK.	Judul Paragraf 1 (Lead) Paragraf 2 Paragraf 3
<i>Diagnose causes</i>	Setelah SYL ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.	Paragraf 5 Paragraf 6
<i>Make moral judgement</i>	Penggunaan uang hasil korupsi untuk kepentingan pribadi SYL serta kepentingan Partai NasDem. SYL menyatakan menghormati proses hukum namun meminta penjadwalan ulang pemanggilannya.	Paragraf 6 Paragraf 8
<i>Treatment recommendation</i>	Sidang gugatan praperadilan KPK menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka.	Paragraf 4 Paragraf 7 Paragraf 8

Deskripsi Framing

a. Define Problems

Elemen *define problems* pada analisis model Entman berikaitan dengan temuan masalah serta bagaimana media menyajikan suatu peristiwa sebagai masalah, masalah apa yang ditekankan, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Dalam berita ini, seleksi isu pada elemen *define problems* adalah gugatan SYL terhadap keabsahan status tersangkanya oleh KPK yang juga merupakan news hook utama. Kasus gugatan praperadilan ini ditonjolkan melalui validasi dari sumber resmi pengadilan, yakni Humas PN Jaksel dan penyebutan detail registrasi perkara. Sedangkan, masalah korupsi yang mendasar ditonjolkan dengan menempatkannya persis setelah narasi gugatan yang secara efektif membingkai perlawanan hukum tersebut dalam konteks kejahatan yang dituduhkan.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Gugatan Syahrul Yasin Limpo itu terkait keabsahan penetapan tersangka...”
- 2) “nomor registrasi perkara 114/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.”

b. *Diagnose Causes*

Diagnose causes berkaitan dengan media mengarahkan siapa atau apa yang dianggap bertanggung jawab atas masalah dari sebuah kasus yang diberitakan, baik secara langsung (aktor) maupun sistemik (struktur). Dalam elemen ini, seleksi isu pada penyebab dari gugatan praperadilan dilayangkan adalah fakta bahwa SYL menjadi tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan partai. Penonjolan isu dengan mengutip sumber anonim “penegak hukum”, untuk memberi kesan informasi ‘dari dalam’ yang valid. Lalu ditonjolkan pula dengan detail kasus korupsinya. Hal ini secara halus menempatkan perlawanan hukum SYL sebagai reaksi terhadap sebuah kejahatan yang memang benar terjadi.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “...terkait keabsahan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”
- 2) “Menurut salah seorang penegak hukum, Syahrul Yasin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka...”
- 3) “Syahrul Yasin Limpo diduga mengumpulkan upeti dari bawahannya... total nilai Rp 4,94 miliar.”

c. *Make Moral Judgement*

Elemen ini berkaitan dengan penilaian moral yang disisipkan oleh media terhadap masalah atau pihak-pihak yang terlibat, bisa secara implisit atau eksplisit. Penilaian moral dalam berita ini lebih secara halus. Seleksi isu yang dihadirkan adalah uang korupsi digunakan untuk kepentingan pribadi dan SYL tidak memenuhi panggilan KPK pada hari yang sama saat gugatan dilayangkan dengan alasan pribadi. Ditonkolkan dengan menyebutkan detail hukum berupa gugatan, pasal, dan rincian korupsinya. Sementara penempatan alasan “menemui Ibu di kampung” di akhir berita menciptakan sebuah kontras yang berpotensi membangun citra negatif, bisa dipersepsikan sebagai upaya mengulur-ulur waktu atau bahkan menghindar. Meskipun SYL menyatakan “menghormati KPK,” penjabaran fakta ini membuat pernyataannya terkesan kontradiktif sehingga melemahkan nilai moralnya.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Uang itu dikumpulkan untuk kepentingan pribadi Syahrul Yasin Limpo beserta keluarga dan sumbangan untuk acara Partai NasDem.”
- 2) “Namun, kader Partai NasDem itu meminta menjadwalkan ulang karena ingin menemui orang tuanya di kampung halaman.”
- 3) “Saya menghormati KPK. Namun izinkan saya terlebih dahulu menemui Ibu di kampung.”

d. *Treatment Recommendation*

Rekomendasi penyelesaian tentang bagaimana masalah diselesaikan atau langkah-langkah yang sebaiknya diambil, yang tersaji pada teks berita. Solusi yang diseleksi pada elemen ini adalah sidang di pengadilan dan proses penyidikan KPK yang terus berjalan. Jalur praperadilan ditonjolkan dengan detail prosedural dengan penyebutan hakim tunggal Alimin Ribut Sujono dan jadwal sidang yang memberinya legitimasi formal. Kemudian, dengan menyebutkan bahwa KPK tetap menjadwalkan pemanggilan pada hari itu, digunakan untuk menonjolkan proses hukum utama yang dilakukan oleh KPK tidak berhenti. Dari elemen ini membingkai praperadilan sebagai sebuah manuver taktis dan proses hukum yang sesungguhnya tetap terus berjalan di KPK.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “sidang perdana praperadilan ini dimulai pada Senin, 30 Oktober 2023 mendatang dan akan dipimpin oleh hakim tunggal Alimin Ribut Sujono.”
- 2) “Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga dijadwalkan pemanggilan hari ini.”

Berita ini berisikan dua narasumber, yakni Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto dan Perwakilan Kuasa Hukum SYL, Ervin Lubis. Humas PN Jakarta Selatan menjadi narasumber yang paling sering muncul. Selain informasi mengenai gugatan praperadilan, berita ini juga menyampaikan apa saja bentuk korupsi yang dilakukan oleh SYL dan pasal undang-undang yang dilanggar yang berjumlah tiga paragraf.

3. Berita 14 Oktober 2023, KPK Sebut Soal Aliran Miliaran Rupiah dari Syahrul Yasin Limpo, NasDem: Tidak Ada

Tabel 3. 3 Analisis *Framing* Berita *Tempo.co* dengan Judul “KPK Sebut Soal Aliran Miliaran Rupiah dari Syahrul Yasin Limpo, NasDem: Tidak Ada”

Perangkat <i>framing</i>	<i>Frame</i>	Letak
<i>Define problems</i>	KPK menyebut adanya aliran dana korupsi SYL ke Partai NasDem. Partai NasDem membantah pernyataan KPK.	Judul Paragraf 1 (Lead) Paragraf 2 Paragraf 3
<i>Diagnose causes</i>	Pernyataan KPK tentang aliran dana korupsi didasari atas informasi berupa laporan PPATK.	Paragraf 4 Paragraf 9 Paragraf 10
<i>Make moral judgement</i>	Partai NasDem membantah dugaan aliran dana korupsi dari SYL.	Paragraf 1 (Lead) Paragraf 2
<i>Treatment recommendation</i>	KPK akan melakukan investigasi lanjutan dan berkoordinasi dengan pihak lainnya.	Paragraf 5 Paragraf 6 Paragraf 7 Paragraf 8

Deskripsi *Framing*

a. *Define Problems*

Elemen *define problems* pada analisis model Entman berikaitan dengan temuan masalah serta bagaimana media menyajikan suatu peristiwa sebagai masalah, masalah apa yang ditekankan, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Masalah utama yang dibingkai dalam berita ini adalah potensi kebohongan atau inkonsistensi pernyataan partai politik di hadapan publik. Fakta yang diseleksi adalah pernyataan bantahan dari petinggi Partai NasDem yang kemudian langsung dikonfrontasikan dengan pernyataan KPK serta detail data transaksi. Penonjolan isu untuk membingkai masalah dalam berita ini dengan menggunakan struktur narasi konflik. Teks berita diawali dengan menyajikan pernyataan bantahan sebagai klaim NasDem, namun segera menghadirkan

pernyataan KPK sebagai antitesisnya, kemudian menutupnya dengan “bukti” yang spesifik pada paragraf terakhir. Hal ini membuat bantahan tersebut terlihat sebagai klaim yang perlu diuji, bukan sebagai fakta final.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Tidak ada dana hasil korupsi Pak Syahrul ke Partai.”
- 2) “Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan akan mendalami temuan soal dugaan adanya aliran penggunaan uang...”
- 3) Paragraf terakhir yang merinci transaksi, tanggal, dan keterangan transfer.

b. *Diagnose Causes*

Diagnose causes berkaitan dengan media mengarahkan siapa atau apa yang dianggap bertanggung jawab atas masalah dari sebuah kasus yang diberitakan, baik secara langsung (aktor) maupun sistemik (struktur). Pernyataan dari KPK mengenai adanya deteksi aliran dana, diidentifikasi sebagai *diagnose causes* dalam berita ini. Fakta yang diseleksi adalah rincian transaksi dari ajudan dan bagian keuangan Kementan. Pada elemen ini, isu ditonjolkan dengan presisi yang membuatnya terlihat faktual dan sulit dibantah. Penggunaan frasa “terdeteksi menyumbang”, penyebutan inisial “Eg, Kr”, nominal yang presisi dengan jumlah “Rp 81,2 juta, Rp 24,9 juta”, dan kutipan langsung dari keterangan transfer “Sumbangan pelantikan 5 DPW NasDem” menunjukkan tuduhan ini sebagai sesuatu yang berbasis data bukan sekadar opini belaka.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Sebagai elit NasDem, SYL dikabarkan beberapa kali terdeteksi menyumbang untuk partainya.”
- 2) “...terdapat transaksi dengan keterangan: “Sumbangan pelantikan 5 DPW NasDem”...”
- 3) “...keterangan “BANTUAN AN SYAHRUL YASIN LIMPO.””

c. *Make Moral Judgement*

Elemen ini berkaitan dengan penilaian moral yang disisipkan oleh media terhadap masalah atau pihak-pihak yang terlibat, bisa secara implisit atau

eksplisit. Penilaian moral tidak disampaikan secara langsung, melainkan dibangun melalui penjajaran narasi yang kontradiktif. Fakta yang diseleksi adalah pernyataan mutlak “Tidak ada” dari NasDem, yang kemudian dihadapkan dengan bukti-bukti yang menunjukkan sebaliknya. Pemilihan foto juga menjadi kunci di elemen ini. Penilaian yang membingkai keraguan terhadap NasDem ditonjolkan dalam beberapa hal. Pertama, melalui struktur berita dengan meletakkan pernyataan bantahan di awal berita hanya untuk dipatahkan secara sistematis, membuatnya tampak lemah. Kedua, melalui kontradiksi visual-teks. Ini adalah teknik yang paling kuat. Teks berisi penyangkalan hubungan dana korupsi, namun gambar justru menunjukkan SYL yang telah bercitra negatif sedang berada di markas besar Partai NasDem, di bawah slogan “Restorasi Indonesia”. Penonjolan visual ini secara kuat mengasosiasikan SYL dengan NasDem, membuat bantahan lisan dalam teks berita menjadi tidak meyakinkan.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Tidak ada dana hasil korupsi Pak Syahrul ke Partai.”
- 2) Foto SYL yang diambil di NasDem Tower, dikelilingi para petinggi partai, dengan latar belakang logo partai dan slogan “IT’S TIME! RESTORASI INDONESIA”.

d. *Treatment Recommendation*

Rekomendasi penyelesaian tentang bagaimana masalah diselesaikan atau langkah-langkah yang sebaiknya diambil, yang tersaji pada teks berita. Solusi yang ditawarkan dalam berita ini adalah proses investigasi profesional oleh KPK. Fakta yang dipilih adalah penjelasan teknis dari Alex Marwata tentang bagaimana KPK akan bekerja melalui “koordinasi PPATK, meminta data ke bank”. Solusi ditonjolkan sebagai jalan menuju kebenaran yang objektif dan berbasis bukti, berlawanan dengan bantahan politik yang hanya berbasis klaim lisan. Dengan merinci metode investigasi KPK, teks berita menonjolkan proses ini sebagai satu-satunya cara yang valid untuk menyelesaikan masalah, dan secara implisit mengesampingkan bantahan NasDem sebagai sesuatu yang belum teruji.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Selanjutnya, kata Alex, KPK akan menelusurinya...”
- 2) “Nanti kami akan meminta bank terkait untuk membuka laporan transaksi...”
- 3) “Bentuknya transfer atau belanja barang pasti nanti akan dialami.”

Berita ini menampilkan dua narasumber, yaitu Ketua DPP Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi dan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Dimana Wakil Ketua KPK menjadi narasumber yang paling sering muncul dengan jumlah enam paragraf. Sementara itu visual yang digunakan pada berita ini adalah foto Syahrul Yasin Limpo meninggalkan Kantor NasDem usai memberikan keterangan pers terkait kasus yang menjeratnya dengan didampingi para petinggi Partai NasDem.

4. Berita 13 Oktober 2023, Jokowi: Penangkapan Syahrul Yasin Limpo oleh KPK Itu Proses Hukum

Tabel 3. 4 Analisis *Framing* Berita *Tempo.co* dengan Judul “Jokowi: Penangkapan Syahrul Yasin Limpo oleh KPK Itu Proses Hukum”

Perangkat <i>framing</i>	<i>Frame</i>	Letak
<i>Define problems</i>	Penangkapan SYL yang dilakukan lebih cepat dari jadwal yang sudah ditetapkan.	Paragraf 1
		Paragraf 3
<i>Diagnose causes</i>	SYL tidak hadir pada jadwal pemeriksaan terkait statusnya sebagai tersangka korupsi di Kementerian Pertanian.	Paragraf 4
		Paragraf 5
<i>Make moral judgement</i>	Presiden Jokowi menyebut ini merupakan proses hukum yang harus dihormati. SYL adalah menteri keenam di kabinet Jokowi dan kedua dari NasDem yang terjerat korupsi. KPK sendiri juga bermasalah.	Paragraf 1
		Paragraf 2
		Paragraf 7
		Paragraf 8
<i>Treatment recommendation</i>	Adanya proses penyidikan oleh KPK. Penangkapan atas dasar SYL tak kunjung hadir dalam pemeriksaan terjadwal.	Paragraf 3
		Paragraf 4
		Paragraf 5
		Paragraf 6

Deskripsi *Framing*

a. *Define Problems*

Elemen *define problems* pada analisis model Entman berikaitan dengan temuan masalah serta bagaimana media menyajikan suatu peristiwa sebagai masalah, masalah apa yang ditekankan, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Dalam berita ini, pendefinisian masalahnya adalah penangkapan SYL yang dipercepat. Seleksi isunya adalah pernyataan yang bersumber dari pihak SYL. Adanya jadwal pemeriksaan yang konkret dan klaim telah menjalin komunikasi dengan penyidik, menunjukkan sudah adanya kesepakatan formal antara pihak SYL dan KPK serta mencitrakan SYL tidak mangkir dari panggilan KPK. Kemudian diperkuat dengan pernyataan kuasa hukum SYL yang berjanji untuk hadir dan kooperatif, secara langsung merepresentasikan bahwa tidak ada alasan yang mendasari KPK untuk melakukan tindakan paksa berupa penangkapan lebih cepat dari jadwal. *Frame* ini ditonjolkan dengan menggunakan kata hubung pertentangan “Padahal” dan kutipan langsung untuk menciptakan narasi tandingan yang mempertanyakan tindakan KPK. Sementara itu, pernyataan presiden menjadi argumen pembenaran terhadap tindakan KPK. Kehadiran frame ini berhasil menciptakan keraguan dan menyajikan peristiwa penangkapan sebagai sebuah tindakan kontroversial secara prosedur.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “KPK menangkap tersangka dugaan korupsi kementerian pertanian Syahrul Yasin Limpo... pada Kamis malam, 12 Oktober 2023.”
- 2) “...sudah dijadwalkan mengikuti pemeriksaan pada Jumat, 13 Oktober 2023.”
- 3) “Kami berkomunikasi... mengkonfirmasi akan tetap hadir dan kooperatif,”

b. *Diagnose Causes*

Diagnose causes berkaitan dengan media mengarahkan siapa atau apa yang dianggap bertanggung jawab atas masalah dari sebuah kasus yang diberitakan, baik secara langsung (aktor) maupun sistemik (struktur). Pada elemen ini mengidentifikasi penyebab penangkapan SYL dipercepat adalah ketidakhadiran SYL dalam jadwal pemeriksaan. Seleksi isu dengan pemilihan fakta bahwa KPK menunggu kehadiran SYL untuk memposisikan KPK telah bertindak sesuai prosedur dan tidak tergesa-gesa. Fakta bahwa SYL tidak hadir

menyatakan kegagalan dari pihak SYL untuk memenuhi panggilan. Sementara penjelasan rincian kasus memberi bobot dan menjadi urgensi pada pemeriksaan yang tidak dihadiri tersebut. *Frame* ini ditonjolkan dengan struktur narasi sebab-akibat yang jelas, ketidakhadiran SYL langsung diikuti dengan keputusan KPK melakukan penangkapan yang menunjukkan bahwa KPK tidak bertindak sewenang-wenang, melainkan sebuah konsekuensi yang logis dan perlu akibat dari sikap tersangka yang dinilai tidak kooperatif. Selain itu, penonjolan isu juga diperkuat dengan adanya pernyataan Juru Bicara KPK sebagai sumber resmi sehingga informasi yang disampaikan kredibel, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) "...sudah menunggu Syahrul Yasin Limpo sampai Kamis sore untuk melakukan pemeriksaan, namun eks gubernur Sulawesi Selatan itu tidak muncul."
- 2) "...tiga klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yaitu pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)."

c. *Make Moral Judgement*

Elemen ini berkaitan dengan penilaian moral yang disisipkan oleh media terhadap masalah atau pihak-pihak yang terlibat, bisa secara implisit atau eksplisit. Dalam teks berita ini, penilaian moral pertama diarahkan pada pernyataan Presiden Jokowi. *Frame* ini ditonjolkan dengan menempatkan Presiden Jokowi merupakan sumbernya secara otomatis dinilai sebagai pernyataan resmi negara atau pemerintah, lalu dengan penggunaan diksi "hormati proses hukum" menunjukkan pemerintah menyerahkan segalanya pada aturan main yang berlaku menyajikan penilaian moral bahwa sistem berjalan normal dan sesuai prosedur. Kedua, penilaian moral diarahkan pada fakta bahwa SYL menteri keenam di kabinet pemerintahan yang terjerat korupsi. *Frame* ini menonjolkan penilaian sebuah tren kegagalan yang serius di dalam kabinet. Fakta ini ditempatkan setelah pernyataan Presiden. Ini menciptakan kontras yang tajam antara Presiden meminta kita menghormati proses, namun teks berita langsung menunjukkan bahwa proses ini telah "menghasilkan" enam menteri korup. Ini

secara implisit menggugat efektivitas pengawasan Presiden dan memberikan penilaian moral negatif pada pemerintahannya karena masalah yang terus berulang terjadi. Ketiga, penilaian moral diarahkan pada fakta laporan terhadap Ketua KPK. Dengan frasa “disebut memeras Syahrul Yasin Limpo” yang menghubungkan langsung skandal di KPK dengan kasus yang sedang dibahas serta kalimat “Firli telah membantah tuduhan ini” juga diseleksi untuk memenuhi kaidah keberimbangan, namun tidak menghapus dampak dari tuduhan itu sendiri sehingga penilaian moralnya adalah bahwa sistem secara keseluruhan mungkin korup, dari pejabat yang ditangkap hingga pejabat yang menangkap.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Kita harus hormati proses hukum yang ada.”
- 2) “Syahrul Yasin Limpo merupakan menteri keenam di kabinet Jokowi yang menghadapi tuduhan korupsi.”
- 3) “Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ia disebut memeras Syahrul Yasin Limpo...”
- 4) Foto Presiden Jokowi yang sedang menerima SYL di Istana Merdeka pada 8 Oktober 2023.

d. *Treatment Recommendation*

Rekomendasi penyelesaian tentang bagaimana masalah diselesaikan atau langkah-langkah yang sebaiknya diambil, yang tersaji pada teks berita. Solusi yang ditawarkan dalam berita ini adalah adanya proses penyidikan serta adanya penangkapan karena SYL tidak muncul dalam pemeriksaan. Dengan penggunaan frasa “telah menggeledah sejumlah tempat” diseleksi untuk menunjukkan bahwa ini adalah proses penyidikan sudah berjalan sejak lama. Teks juga menyeleksi bahwa KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi yang ditonjolkan melalui penyebutan istilah hukum “...yaitu pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)”. Hal ini untuk menunjukkan proses penyidikan terhadap cakupan yang luas secara komprehensif dan bukan asal-asalan. Lalu fakta bahwa proses penyidikan sudah membuahkan hasil, ditonjolkan dengan temuan uang dan senjata untuk memberi justifikasi yang sangat kuat terhadap seluruh proses penyidikan.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “KPK menangkap tersangka dugaan korupsi kementerian pertanian Syahrul Yasin Limpo...”
- 2) “...namun eks gubernur Sulawesi Selatan itu tidak muncul.”
- 3) “Penyidik telah menggeledah sejumlah tempat terkait penyidikan...”
- 4) “KPK mendapati uang puluhan miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing... 12 pucuk senjata api...”

Narasumber pada berita ini, diantaranya adalah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Tim Kuasa Hukum SYL, Febri Diansyah, dan Juru Bicara KPK, Ali Fikri dengan porsi yang berimbang. Dalam berita ini, sudah dapat terlihat bahwa pernyataan Jokowi-lah yang menjadi judul beritanya. Visual yang digunakan dalam berita ini menampilkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo yang didampingi Mensesneg Pratikno, dan Syahrul Yasin Limpo di Istana.

5. Berita 13 Oktober 2023, Jokowi Tepis Isu Politisasi Kasus Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo

Tabel 3. 5 Analisis *Framing* Berita *Tempo.co* dengan Judul “Jokowi Tepis Isu Politisasi Kasus Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo”

Perangkat <i>framing</i>	<i>Frame</i>	Letak
<i>Define problems</i>	Presiden membantah bahwa penangkapan SYL memiliki motif politis. Hal tersebut merupakan proses hukum yang harus dijalani.	Judul Paragraf 1 (Lead) Paragraf 4
<i>Defining causes</i>	SYL berasal dari Partai Nasdem. Partai ini mendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pemilu Presiden 2024. Nasdem berbeda kubu dengan presiden Joko Widodo yang mendukung Prabowo-Gibran.	Paragraf 3 Paragraf 5 Paragraf 6 Paragraf 7
<i>Make moral judgement</i>	Pernyataan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) - satu kubu dengan Nasdem dalam Pilpres 2024 tentang hukum yang harus adil.	Paragraf 9 Paragraf 10 Paragraf 12

	Presiden Jokowi menegaskan ini merupakan proses hukum yang harus dihormati. KPK sendiri juga bermasalah.	
<i>Treatment recommendation</i>	Adanya proses penyidikan dan jaminan dari pihak SYL akan menaati hukum.	Paragraf 2 Paragraf 8 Paragraf 11

Deskripsi *Framing*

a. *Define Problems*

Elemen *define problems* pada analisis model Entman berkaitan dengan temuan masalah serta bagaimana media menyajikan suatu peristiwa sebagai masalah, masalah apa yang ditekankan, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Dalam berita ini, pendefinisian masalah adalah dugaan politisasi penegakan hukum dalam kontestasi politik menjelang pemilu. Isu diseleksi dengan bingkai dua sudut pandang. Menurut Presiden, masalahnya tidak ada sesuai dengan pernyataan “Apa hubungannya, maksudnya (politisasi)...”. Sedangkan menurut pengamat hukum, masalahnya adalah adanya instrumentalisisasi hukum untuk kepentingan politik. Masalah ini ditonjolkan melalui struktur perdebatan argumen, namun tidak seimbang. Pernyataan singkat Presiden yang menepis isu, langsung diikuti oleh teks yang menguraikan mengapa isu politisasi itu ada, lengkap beserta dengan suara dari pengamat hukum dan tokoh oposisi.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Presiden Joko Widodo atau Jokowi menepis isu politisasi kasus hukum...”
- 2) “Apa hubungannya, maksudnya (politisasi),’ kata Jokowi...”
- 3) “Itu proses hukum yang memang harus dijalani.”

b. *Diagnose Causes*

Diagnose causes berkaitan dengan media mengarahkan siapa atau apa yang dianggap bertanggung jawab atas masalah dari sebuah kasus yang diberitakan, baik secara langsung (aktor) maupun sistemik (struktur). Penyebab

dari munculnya isu politisasi ini diidentifikasi secara spesifik, yaitu perubahan sikap politik Partai NasDem. Seleksi isunya pada nuansa politik dalam kasus ini. Dari perspektif politik, yaitu adanya tujuan untuk melemahkan lawan politik yang ditonjolkan dengan menyajikan kronologi politik yang jelas bahwa NasDem tadinya pendukung pemerintah, lalu mendukung Anies Baswedan, kemudian dua menterinya terjerat kasus korupsi. Rangkaian ini disajikan secara berurutan untuk menciptakan hubungan sebab-akibat. Diagnosa ini diperkuat oleh kutipan langsung dari pengamat yang menyebut tujuan spesifiknya “menggembosi dan melemahkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar”.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “NasDem merupakan partai pendukung pemerintahan Jokowi. Belakangan, Partai NasDem mendukung Anies Baswedan untuk menjadi bakal calon presiden...”
- 2) “Dia melihat, tujuannya untuk menggembosi dan melemahkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan...”

c. *Make Moral Judgement*

Elemen ini berkaitan dengan penilaian moral yang disisipkan oleh media terhadap masalah atau pihak-pihak yang terlibat, bisa secara implisit atau eksplisit. Penilaian moral diarahkan pada integritas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Seleksi isu untuk membangun penilaian ini melalui kutipan “bukan rahasia umum” dari pengamat, “tajam ke lawan, tumpul ke kawan” dari politisi yang menjadi sebuah kiasan, rincian temuan uang puluhan miliar dan senjata api, serta dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK. Isu ditonjolkan dengan klaim politisasi diapit di antara bantahan normatif Presiden dan bukti-bukti kriminalitas SYL yang vulgar “uang, senjata”. Hal ini menciptakan ambiguitas moral yang kompleks, di satu sisi hukum mungkin dipolitisasi, di sisi lain tersangka memang tampak bersalah. Di akhir berita, dengan kembali menonjolkan skandal di internal KPK seolah memberi penilaian moral bahwa semua pihak dalam pusaran kasus ini memiliki masalah integritas.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera minta proses hukum terhadap Syahrul Yasin Limpo diterapkan secara adil.”
- 2) “Hukum jangan tajam ke lawan, tapi tumpul kepada kawan.”
- 3) “Kita harus hormati proses hukum yang ada,” katanya (Jokowi).
- 4) Paragraf terakhir tentang laporan pemerasan yang diduga dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri.

d. *Treatment Recommendation*

Rekomendasi penyelesaian tentang bagaimana masalah diselesaikan atau langkah-langkah yang sebaiknya diambil, yang tersaji pada teks berita. Solusi yang ditawarkan dalam teks berita ini adalah rangkaian tindakan penegakan hukum dengan penyidikan. Seleksi isu dengan pemilihan fakta berupa proses penyidikan yang ditonjolkan menggunakan frasa, seperti “menangkap” dan “menggeledah” merepresentasikan tindakan nyata dari KPK. Penggunaan kata kerja aktif menunjukkan kekuatan dan kontrol dari penegak hukum. Penonjolan lainnya, dengan frasa yang terasa sangat visual “dengan tangan diborgol” yang melambangkan hilangnya kekuasaan tersangka dan kemenangan penegak hukum, menjadikan penangkapan sebagai solusi akhir. Sementara, frame jaminan taat hukum diseleksi dengan fakta sudah adanya jadwal pemeriksaan yang disepakati, kutipan yang menegaskan adanya komunikasi pihak SYL dengan KPK, dan kutipan pernyataan “tetap hadir dan kooperatif,”. *Frame* ini ditonjolkan dengan cara ditempatkan persis setelah paragraf yang menggambarkan penangkapan paksa. Penjajaran ini secara efektif menekankan janji tersebut sebagai sesuatu yang kontradiktif dengan kenyataan.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Lembaga antirasuah menangkap tersangka dugaan korupsi Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo.”
- 2) “Penyidik telah menggeledah sejumlah tempat terkait penyidikan tersebut... penyidik KPK mendapati uang puluhan miliar... menemukan 12 pucuk senjata api...”
- 3) “Kami berkomunikasi dengan penyidikan KPK, mengkonfirmasi akan tetap hadir dan kooperatif,” kata Febri.

Narasumber pada berita ini, diantaranya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Tim Kuasa Hukum SYL, Febri Diansyah, dan Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera. Pernyataan Jokowi juga menjadi judul pada berita ini. Selain itu, Jokowi juga menjadi narasumber yang paling sering muncul, diikuti dengan Ujang Komarudin, Febri Diansyah, dan Mardani Ali Sera.

6. Berita 12 Oktober 2023, NasDem Belum Akan Pecat Syahrul Yasin Limpo

Tabel 3. 6 Analisis *Framing* Berita *Tempo.co* dengan Judul “NasDem Belum Akan Pecat Syahrul Yasin Limpo”

Perangkat <i>framing</i>	<i>Frame</i>	Letak
<i>Define problems</i>	Partai Nasdem tidak tergesa-gesa dalam memutuskan pemecatan SYL.	Paragraf 1 (Lead)
		Paragraf 2
<i>Diagnose causes</i>	SYL dijemput paksa oleh KPK akibat kasus korupsi di Kementerian Pertanian.	Paragraf 3
		Paragraf 4
		Paragraf 5
		Paragraf 6
		Paragraf 7
<i>Make moral judgement</i>	Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan partainya punya komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi.	Paragraf 13
		Paragraf 14
<i>Treatment recommendation</i>	Dasar KPK melakukan penangkapan karena SYL tidak menggubris surat panggilan dari KPK.	Paragraf 8
		Paragraf 9
		Paragraf 10
		Paragraf 11
		Paragraf 12

Deskripsi *Framing*

a. *Define Problems*

Elemen *define problems* pada analisis model Entman berikaitan dengan temuan masalah serta bagaimana media menyajikan suatu peristiwa sebagai

masalah, masalah apa yang ditekankan, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Masalah yang didefinisikan dalam berita berjudul “NasDem Belum Akan Pecat Syahrul Yasin Limpo” ini adalah sikap Partai Nasdem yang tidak tergesa-gesa dalam memutuskan pemecatan terhadap SYL. Fakta yang diseleksi adalah pernyataan langsung dari Bendahara NasDem yang ditonjolkan melalui pernyataan “Belum, belum” dan penggunaan frasa “tak akan tergesa-gesa” pada teks berita, yang bisa diinterpretasikan sebagai sebuah retorika dan menunjukkan keragu-raguan dari Partai NasDem sendiri.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni mengatakan... “Belum, belum,” kata dia...”

b. *Diagnose Causes*

Diagnose causes berkaitan dengan media mengarahkan siapa atau apa yang dianggap bertanggung jawab atas masalah dari sebuah kasus yang diberitakan, baik secara langsung (aktor) maupun sistemik (struktur). Elemen ini mengatribusikan penjemputan paksa terhadap SYL sebagai penyebab munculnya pernyataan sikap Partai NasDem pada elemen sebelumnya. Fakta yang dipilih adalah pernyataan langsung dari Juru Bicara KPK yang menjelaskan bahwa KPK telah melakukan penangkapan. Isu ditonjolkan melalui penggunaan frasa “ditangkap”, frasa “dijemput paksa” pada keterangan gambar, serta frasa “punya dasar hukum yang kuat” secara langsung juga membingkai tindakan KPK sebagai tindakan yang tepat sekaligus sebuah solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh tersangka. Selain itu, visual yang memperlihatkan SYL dikawal penyidik setibanya di gedung KPK merupakan bentuk penegasan “masalah” yang sedang ditangani.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Syahrul Yasin Limpo hari ini ditangkap di salah satu apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.”
- 2) “Hari ini KPK melakukan penangkapan... Tadi satu tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL...”

- 3) “Tentu ketika kami melakukan upaya paksa penangkapan pasti punya dasar hukum yang kuat.”
- 4) Foto penangkapan dan pengawalan penyidik terhadap SYL setibanya di gedung KPK.

c. *Make Moral Judgement*

Elemen ini berkaitan dengan penilaian moral yang disisipkan oleh media terhadap masalah atau pihak-pihak yang terlibat, bisa secara implisit atau eksplisit. Teks berita ini memberikan penilaian moral terhadap Partai NasDem melalui pernyataan lama dari Ketua Umum NasDem, Surya Paloh tentang komitmen anti-korupsi. Penilaian moral yang ditonjolkan menimbulkan sebuah ironi. Dimana kutipan Surya Paloh tentang “jangan lari dari masalah” dan “semangat dan nilai kepeloporan... dalam upaya pemberantasan korupsi” terasa kontradiktif ketika disajikan dalam berita tentang penangkapan kadernya akibat korupsi dan dianggap tidak kooperatif. Hal ini bisa menempatkan posisi moral yang canggung dengan tidak sejalanannya komitmen NasDem dengan apa yang terjadi pada kenyataannya.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “NasDem tetap pada komitmennya. Ada permasalahan, jangan lari dari masalah, hadapi permasalahan. Kami ingin agar bisa memberikan semangat dan nilai kepeloporan selalu ke depan dalam upaya pemberantasan korupsi”

d. *Treatment Recommendation*

Rekomendasi penyelesaian tentang bagaimana masalah diselesaikan atau langkah-langkah yang sebaiknya diambil, yang tersaji pada teks berita. Rekomendasi penyelesaian masalah dalam berita ini adalah sikap tidak kooperatif dari SYL sehingga dilakukan penangkapan paksa. Seleksi isu dengan memilih fakta bahwa SYL sudah diberi waktu namun tidak datang padahal sudah terdeteksi berada di Jakarta. Isu ditonjolkan melalui penjelasan kronologis dan logis dari KPK. Salah satunya pernyataan Juru Bicara KPK, “Kalau kooperatif, seharusnya datang hari ini. Tapi sampai sore tidak muncul,” serta adanya kekhawatiran melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang secara

langsung menempatkan kesalahan kepada SYL dan KPK bertindak cepat karena hal tersebut.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “...sudah memberikan waktu dan ruang, namun tak kunjung datang hingga sore tadi.”
- 2) “...kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Itu yang jadi dasar tim penyidik KPK.”
- 3) “Kalau kooperatif, seharusnya datang hari ini. Tapi sampai sore tidak muncul.”

Narasumber pada berita ini dan yang paling sering muncul secara berurutan adalah Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Lalu Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan jumlah paragraf yang sama. Pernyataan dari Ahmad Sahroni menjadi sumber judul berita ini. Foto Syahrul Yasin Limpo tiba di Gedung KPK dengan dikawal penyidik usai dijemput paksa menjadi gambar utama yang digunakan dalam berita ini.

B. Analisis *Framing* Majalah *Tempo*

1. Berita 15 Oktober 2023, KPK Tangkap Syahrul Yasin Limpo

Tabel 3. 7 Analisis *Framing* Berita Majalah *Tempo* dengan Judul “KPK Tangkap Syahrul Yasin Limpo”

Perangkat <i>framing</i>	<i>Frame</i>	Letak
<i>Define problems</i>	KPK melakukan penangkapan terhadap SYL.	Judul, Paragraf 1 (Lead)
<i>Diagnose causes</i>	Tersangka korupsi di Kementerian Pertanian.	Paragraf 2, 3
<i>Make moral judgement</i>	SYL siap mengikuti proses hukum. SYL meminta untuk menjunjung asas praduga tak bersalah.	Paragraf 4
<i>Treatment recommendation</i>	SYL langsung diperiksa KPK. Penggeledahan rumah dinas SYL.	Paragraf 1 (Lead)

Deskripsi *Framing*

a. *Define Problems*

Elemen *define problems* pada analisis model Entman berkaitan dengan temuan masalah serta bagaimana media menyajikan suatu peristiwa sebagai masalah, masalah apa yang ditekankan, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Dalam pemberitaan ini, seleksi isu pada elemen *define problems* adalah penangkapan terhadap SYL yang dilakukan oleh KPK. Penonjolan isu dengan penggunaan frasa “tangkap” pada judul berita dan frasa “mencokok” yang merepresentasikan tindakan konkret yang dijalankan KPK. Selain itu, isu ini juga ditonjolkan dengan foto SYL sudah menggunakan rompi oranye khas tahanan KPK se usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “...Komisi Pemberantasan Korupsi mencokok bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo...”

b. *Diagnose Cause*

Diagnose causes berkaitan dengan media mengarahkan siapa atau apa yang dianggap bertanggung jawab atas masalah dari sebuah kasus yang

diberitakan, baik secara langsung (aktor) maupun sistemik (struktur). Seleksi isu pada elemen ini dengan pemilihan beberapa fakta. Pertama, seleksi pada aktor penyebab adalah Syahrul Yasin Limpo bersama dua anak buahnya di Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyo dan Muhammad Hatta. Kedua, seleksi motif penyebab bahwa dengan fakta tujuan dana korupsi untuk motif politik dan motif pribadi. Terakhir, yang diseleksi adalah mekanisme korupsi. Semua ini ditonjolkan dengan kutipan langsung pernyataan Wakil Ketua KPK sehingga membingkai penyebab sebagai sebuah temuan resmi hasil penyidikan, bukan sekadar opini belaka. Kemudian, ditonjolkan menggunakan penyebutan angka-angka spesifik “nilai miliaran rupiah” dan “Rp13,9 miliar” yang memberikan kesan konkret, terukur, dan faktual sehingga tuduhan tidak terkesan mengawang-awang.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “...Syahrul bersama dua anak buahnya di Kementerian Pertanian...”
- 2) “Ditemukan aliran uang yang ditujukan untuk kepentingan Partai NasDem dengan nilai miliaran rupiah,”
- 3) “...menerima rasuah sebesar Rp13,9 miliar.”

c. *Make Moral Judgement*

Elemen ini berkaitan dengan penilaian moral yang disisipkan oleh media terhadap masalah atau pihak-pihak yang terlibat, bisa secara implisit atau eksplisit. Penilaian moral diarahkan pada fakta bahwa SYL menghormati proses hukum dan meminta prinsip keadilan yang berlaku untuk semua ditegakkan. Seleksi isu pada elemen ini ditonjolkan dengan kutipan pernyataan SYL “siapa mengikuti proses hukum. Ditambah dengan “mendedepankan asas praduga tak bersalah” yang tak hanya sebagai bentuk pembelaan diri, melainkan juga sebagai pengingat moral kepada publik dan media. Hal ini berupaya menempatkan dirinya pada pijakan moral yang lebih tinggi mengacu pada prinsip keadilan yang diakui secara luas. Penonjolan isu lainnya melalui kalimat orang pertama yang lugas, “Saya jangan dihakimi dahulu,” menunjukkan sisi humanis dan kerentanan SYL. Diksi ini adalah permohonan langsung yang bertujuan untuk mengetuk sisi empati publik, diperkuat dengan konteks "sebelum masuk ke rumah tahanan

KPK," yang merepresentasikan bahwa permintaannya dibuat pada momen kejatuhan yang dramatis.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) "Syahrul menyatakan siap mengikuti proses hukum. Ia meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah."
- 2) "Saya jangan dihakimi dahulu,"

d. *Treatment Recommendation*

Rekomendasi penyelesaian tentang bagaimana masalah diselesaikan atau langkah-langkah yang sebaiknya diambil, yang tersaji pada teks berita. Rekomendasi penyelesaian yang tersaji dalam pemberitaan ini adalah tindakan penyidikan yang konkret berupa penggeledahan, penangkapan, dan pemeriksaan lanjutan pasca penangkapan. Penonjolan isunya dengan penggunaan frasa "kemudian memeriksa" yang merepresentasikan bahwa KPK bertindak cepat setelah melakukan penangkapan. Sementara itu, tindakan penggeledahan ditonjolkan dengan frasa "telah menggeledah" serta penggunaan infografis yang menampilkan temuan hasil proses penggeledahan.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) "Komisi antirasuah kemudian memeriksa politikus Partai NasDem itu secara intensif."
- 2) (Gambar) Foto SYL menggunakan rompi tahanan KPK se usai menjalani pemeriksaan.

Berita ini menampilkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dan Mantan Menteri Pertanian sekaligus tersangka kasus korupsi, Syahrul Yasin Limpo sebagai narasumber. Sementara untuk judul berita, bersumber dari keterangan pers Wakil Ketua KPK. Visual yang digunakan dalam berita ini adalah foto SYL yang menggunakan rompi tahanan KPK se usai menjalani pemeriksaan.

2. Berita 8 Oktober 2023, Isi Nasihat Hukum Febri Diansyah cs Agar Syahrul Yasin Limpo Bebas

Tabel 3. 8 Analisis *Framing* Berita Majalah *Tempo* dengan Judul “Isi Nasihat Hukum Febri Diansyah cs Agar Syahrul Yasin Limpo Bebas”

Perangkat <i>framing</i>	<i>Frame</i>	Letak
<i>Define problems</i>	Penemuan dokumen dari Visi Law Office yang memiliki kesamaan dengan dokumen internal KPK. Upaya perintangan penyidikan KPK.	Paragraf 1 (Lead), 2, 3, 7, 8, 12, 13
<i>Diagnose causes</i>	Diduga adanya kebocoran informasi dari KPK. Adanya bukti penghancuran dokumen di Kementerian Pertanian.	Paragraf 4, 5, 6, 9, 15, 16, 17, 19, 20
<i>Make moral judgement</i>	Kuasa hukum SYL mengklaim pembuatan dokumen hukum adalah tindakan yang sah dan sesuai aturan hukum. Penyidik KPK menyimpulkan tindakan kuasa hukum SYL sebagai perintangan penyidikan.	Paragraf 10, 11, 14, 15, 18, 24
<i>Treatment recommendation</i>	KPK melakukan pemeriksaan terhadap para pengacara dari Visi Law Office	Paragraf 3, 16, 21, 22

Deskripsi *Framing*

a. *Define Problems*

Elemen *define problems* pada analisis model Entman berikaitan dengan temuan masalah serta bagaimana media menyajikan suatu peristiwa sebagai masalah, masalah apa yang ditekankan, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Berita ini menyajikan seleksi isu bukan pada kasus korupsi SYL, melainkan pada penemuan dokumen analisis hukum yang isinya identik dengan hasil penyelidikan internal KPK. Fakta ini diseleksi sebagai masalah kebocoran informasi dan potensi perintangan penyidikan. Penonjolan dengan memberikan detail deskriptif pada dokumen tersebut untuk menunjukkan citra krusial dan kerahasiaan. Penggunaan kata “rahasia”, “kaget”, dan detail spesifik “tanda seru merah” membuat masalah ini terasa genting dan signifikan.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dokumen rahasia itu saat menggeledah rumah dinas Menteri pertanian...”

- 2) “Para penyidik yang menemukan dokumen tersebut kaget karena materi analisisnya mengacu pada temuan dugaan korupsi yang mereka presentasikan dalam rapat internal KPK pada 16 Januari lalu.”
- 3) “...tabel paling kanan memuat tanda seru merah.”

b. *Diagnose Cause*

Diagnose causes berkaitan dengan media mengarahkan siapa atau apa yang dianggap bertanggung jawab atas masalah dari sebuah kasus yang diberitakan, baik secara langsung (aktor) maupun sistemik (struktur). Seleksi penyebab diarahkan pada dua hal. Pertama, keterkaitan antara adanya kemungkinan peran para pengacara SYL yang merupakan mantan pegawai KPK dengan dugaan kebocoran informasi. Kedua, adanya bukti fisik penghancuran dokumen di Kementerian Pertanian. Hal ini ditonjolkan dengan menjajarkan status “mantan KPK” dengan peran mereka saat ini sebagai pengacara tersangka korupsi yang telah menciptakan kesan ironis dan adanya konflik kepentingan. Penyebab penghancuran bukti ditonjolkan melalui visual yang menciptakan citra yang sangat kuat dan factual.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Febri dan Rasamala adalah mantan pegawai KPK yang resmi ditunjuk sebagai penasihat hukum Syahrul Yasin Limpo...”
- 2) “Di telepon seluler Kasdi, penyidik menemukan percakapan yang menjurus perintangan penyidikan di salah satu grup Whatsapp. Penegak hukum di KPK mengatakan di grup itu memerintahkan agar anggota grup memusnahkan dokumen...”
- 3) “Febri adalah mantan juru bicara KPK, sedangkan Rasamala pernah menjabat Kepala Bagian Biro Hukum KPK.”
- 4) “*Tempo* melihat salah satu foto penghancuran dokumen. Kertas yang tercacah terlihat berserakan di lantai. Sebagian kertas yang sudah hancur dimasukkan ke karung putih berkapasitas 50 kilogram.”

c. *Make Moral Judgement*

Elemen ini berkaitan dengan penilaian moral yang disisipkan oleh media terhadap masalah atau pihak-pihak yang terlibat, bisa secara implisit atau

eksplisit. Teks ini menempatkan adanya benturan antara etika profesi advokat dengan dugaan pelanggaran hukum. Penilaian moral ini ditonjolkan melalui penggunaan istilah yang kontras. Perspektif KPK ditekankan dengan frasa legal yang berat "tindakan pidana". Sementara itu, klaim pengacara SYL ditonjolkan dengan kata-kata yang mengacu pada hak dan profesionalisme, seperti "hak klien" serta frasa "sah dan sesuai dengan Undang-Undang Advokat".

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) "Penyidik KPK menyimpulkan apa yang dilakukan Febri dan Rasamala sebagai tindakan pidana perimbangan penyelidikan hukum..."
- 2) "Merujuk pada Undang-Undang Advokat, Febri mengatakan pembuatan legal opinion sebagai hak klien dalam mendapat perlindungan hukum."
- 3) "Penyidik KPK menyimpulkan apa yang dilakukan Febri dan Rasamala sebagai tindakan pidana perintangan penyelidikan hukum..."
- 4) "Ia memastikan draf uraian perkara yang dibuat lembaganya sah dan sesuai dengan Undang-Undang Advokat."

d. *Treatment Recommendation*

Rekomendasi penyelesaian tentang bagaimana masalah diselesaikan atau langkah-langkah yang sebaiknya diambil, yang tersaji pada teks berita. Rekomendasi penyelesaian yang ditawarkan adalah langkah nyata yang diambil oleh KPK, yaitu memanggil dan memeriksa para pengacara yang diduga terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya proses hukum yang dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Penyelesaian ini ditonjolkan dengan memberikan informasi yang spesifik dan berorientasi pada tindakan. Penyebutan nama-nama yang diperiksa dan tanggal pemeriksaan membuat langkah penyelesaian ini terasa nyata, dan sedang berlangsung, bukan sekadar wacana.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) "Penyidik sudah meminta konfirmasi ihwal temuan Dokumen itu dengan memanggil para pengacara dari Visi Law Office..."
- 2) "Karena itu, penyidik KPK memeriksa Febri, Rasamala, dan Donal pada Senin, 2 Oktober lalu."

- 3) “Ada tiga pengacara yang dipanggil KPK dari kantor firma hukum itu. Mereka adalah Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donal Fariz.”
- 4) “Yang pasti, dia mengungkapkan, penyidik sudah menanyakan dugaan kebocoran dokumen KPK kepada Febri Diansyah, Rasamala, dan Donal.”

3. Berita 8 Oktober 2023, Syahrul Memeras, Syahrul Diperas. Mana yang Benar?

Tabel 3. 9 Analisis *Framing* Berita Majalah *Tempo* dengan Judul “Syahrul Memeras, Syahrul Diperas. Mana yang Benar?”

Perangkat <i>framing</i>	<i>Frame</i>	Letak
<i>Define problems</i>	Korupsi oleh SYL dengan perkara pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang. Dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri terhadap SYL.	Paragraf 4, 5, 7, 25, 29, 30
<i>Diagnose causes</i>	Pengumpulan setoran dan upeti para pejabat di Kementerian Pertanian. Konflik internal pimpinan KPK. Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim bisa menyetop proses hukum kasus SYL.	Paragraf 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 32
<i>Make moral judgement</i>	SYL sudah jelas bersalah sebagai pelaku korupsi. Namun juga menjaga harga diri. Firli Bahuri sendiri juga bermasalah. Sementara, pimpinan KPK lainnya dinilai profesional. Partai NasDem menyatakan mendukung proses hukum yang berlaku.	Paragraf 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 30, 38, 39
<i>Treatment recommendation</i>	Proses penyidikan KPK terhadap kasus korupsi SYL. Pemeriksaan dan penyidikan oleh Kepolisian terhadap kasus pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri.	Paragraf 1 (Lead), 3, 12, 25, 29, 31, 39

Deskripsi *Framing*

a. *Define Problems*

Elemen *define problems* pada analisis model Entman berikaitan dengan temuan masalah serta bagaimana media menyajikan suatu peristiwa sebagai masalah, masalah apa yang ditekankan, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Ada dua seleksi isu yang disajikan berita ini. Pertama adalah

korupsi masif yang dilakukan oleh SYL. Kedua adalah skandal dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Isu dugaan pemerasan oleh Firli ditempatkan pada bagian akhir berita untuk memberikan efek kejutan dan membingkai ulang keseluruhan narasi. Penonjolan isu dengan data angka yang fantastis untuk menunjukkan skala kejahatannya. Masalah pemerasan oleh Firli ditonjolkan dengan menggunakan kekuasaan dari institusi lain, dalam hal ini kepolisian, yang memberikan bobot kredibilitas pada tuduhan tersebut.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Penyidik KPK menjeratnya dengan tiga perkara sekaligus: pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang.”
- 2) “Di tengah berbagai drama pemeriksaan dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya mengumumkan tengah menyelidiki dugaan pemerasan oleh ketua KPK Firli Bahuri kepada Syahrul Yasin Limpo.”
- 3) “Setelah dihitung, semua uang yang terkumpul mencapai Rp30 miliar.”
- 4) “Rupanya, syahrul melaporkan Firli pada 21 Agustus lalu dengan tuduhan pemerasan.”

b. Diagnose Cause

Diagnose causes berkaitan dengan media mengarahkan siapa atau apa yang dianggap bertanggung jawab atas masalah dari sebuah kasus yang diberitakan, baik secara langsung (aktor) maupun sistemik (struktur). Seleksi isu pada penyebab digambarkan sebagai sebuah sistem yang berjalan terstruktur dengan adanya pengumpulan setoran dan upeti di Kementerian Pertanian. Selain itu, seleksi isu pada sikap Firli Bahuri yang berubah-ubah dan dugaan motif politiknya, ditambah dengan klaim personalnya. Isu yang pertama ditonjolkan melalui penggunaan frasa “secara berjenjang” yang menyiratkan sebuah mekanisme kejahatan yang terorganisir. Sementara isu yang kedua ditonjolkan dengan mengkontraskan sikapnya yang “ngotot” di awal dengan yang “berubah” di akhir, menciptakan citra inkonsistensi dan intervensi pribadi.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Seorang penegak hukum lain di KPK mengatakan pengumpulan setoran dari para pejabat tersebut terjadi secara terstruktur dan masif.”
- 2) “Menurut KPK, nilai setoran para pejabat eselon I, II, dan III itu rata-rata berkisar ratusan juta hingga miliaran rupiah...”
- 3) “Ketika itu ketua KPK Firli Bahuri termasuk pemimpin KPK yang ngotot kasus Syahrul naik ke tahap penyidikan... Belakangan sikap Firli berubah... Ia khawatir kasus Syahrul akan terjerumus menjadi politis menjelang Pemilihan Presiden 2024.”

c. *Make Moral Judgement*

Elemen ini berkaitan dengan penilaian moral yang disisipkan oleh media terhadap masalah atau pihak-pihak yang terlibat, bisa secara implisit atau eksplisit. Berita ini memberikan penilaian moral kepada para aktor dengan seleksi dan penonjolan isu menggunakan pernyataan-pernyataan kunci. Penilaian terhadap SYL ditonjolkan dengan pernyataannya sendiri soal harga diri. Kemudian, perintah tegas Surya Paloh yang merepresentasikan Partai NasDem. Terakhir adalah bantahan Firli yang disandingkan dengan bukti foto pertemuannya. Penilaian moral terhadap Firli sangat ditonjolkan dengan teknik jurnalisme investigatif, menyajikan bantahannya yang langsung dipatahkan dengan bukti foto dan respons gestur tubuhnya. Ini cara yang sangat efektif untuk mengandaskan bantahan Firli.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Saya ini orang Bugis Makassar,” katanya. “Harga diri lebih tinggi dari harta dan jabatan.”
- 2) “Saya minta jangan lari dari masalah,”
- 3) “Saya pastikan itu tidak benar... Foto pertemuan Firli dengan Syahrul di lapangan badminton beredar luas...”
- 4) “Ia pun membantah tuduhan meminta uang kepada Syahrul. ‘Saya pastikan itu tidak benar...’ ...Ketika tempo mengoreksi soal mata uang Dolar Amerika menjadi dolar Singapura, Firli hanya melempar senyum.”

d. *Treatment Recommendation*

Rekomendasi penyelesaian tentang bagaimana masalah diselesaikan atau langkah-langkah yang sebaiknya diambil, yang tersaji pada teks berita. Seleksi isu pada elemen ini adalah penegakan hukum yang berjalan paralel. KPK menangani kasus korupsi SYL dan kepolisian menangani kasus pemerasan Firli. Pemilihan fakta bahwa kasus Firli dinaikkan ke tahap penyidikan, secara khusus untuk menunjukkan keseriusan. Penonjolan isu dengan menggunakan istilah-istilah hukum formal, seperti “surat perintah penyidikan”, “rapat gelar perkara”, “penetapan status tersangka” dan mengutip langsung pihak berwenang. Hal ini memberikan kesan bahwa proses hukum berjalan secara resmi, tegas, dan serius.

Kutipan kalimat dari teks berita :

- 1) “Setelah mengantongi surat perintah penyidikan, penyidik KPK mengecek pemeriksaan.”
- 2) “Ia mengklaim anak buahnya sudah bersepakat menaikkan penanganan kasus pemerasan itu ke tahap penyidikan dalam rapat gelar perkara pada Jumat, 6 Oktober lalu.”
- 3) “Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya komisaris besar Ade Safri Simanjuntak, foto pertemuan Firli dengan Syahrul menguatkan indikasi penyerahan uang.”
- 4) “Untuk penetapan status tersangka masih kami dalam,” katanya.

C. Kebijakan Redaksi *Tempo* Dalam Pemberitaan Kasus Korupsi

Berdasarkan wawancara *online* melalui aplikasi *Zoom* bersama *Tempo* yang diwakili oleh Redaktur sekaligus Jurnalis *Desk Hukum Tempo*, Riky Ferdianto pada Rabu, 25 Juni 2025. Ia menjelaskan prinsip utama dalam kebijakan redaksi *Tempo* berlandaskan pada nilai-nilai dasar atau *value* yang menjadi panduan utama dalam setiap peliputan. Nilai-nilai ini membentuk kerangka berpikir redaksi dalam membingkai sebuah peristiwa. Beberapa prinsip fundamental yang dipegang, misalnya adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum, dukungan terhadap prinsip-prinsip negara demokratis, serta terwujudnya *good and clean governance and corporate*. Lebih lanjut, ditekankan bahwa *Tempo* berpegang pada harapan ideal bahwa penyelenggara negara harus selalu mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, bekerja sesuai undang-undang, serta menghindari konflik kepentingan dan praktik korupsi.

Dijelaskan pula bahwa prinsip-prinsip tersebut memberikan pengaruh untuk membentuk mekanisme kerja di ruang redaksi. Setiap isu yang berasal dari aparat penegak hukum tidak serta-merta diterima, melainkan akan diuji secara kritis dalam rapat redaksi melalui serangkaian pertanyaan fundamental yang mencakup tentang substansi perkara, dasar hukum penetapan tersangka, hingga rincian spesifik seperti modus operandi, pihak yang terlibat, dan kronologi kejadian. Proses interogasi internal ini kemudian menjadi tugas bagi para jurnalis untuk membuktikan dan menggali lebih jauh seluk beluk perkaranya, sehingga memastikan setiap laporan yang diterbitkan telah melalui proses redaksional yang sistematis, dan berbasis pembuktian yang kuat.

Dalam hal pemberantasan korupsi, *Tempo* sendiri tidak pernah secara eksplisit mendeklarasikan visi dan misi khususnya seperti yang disampaikan oleh Ricky. Meskipun demikian, terdapat sebuah pandangan atau kerangka berpikir umum yang menjadi landasan bagi kerja jurnalistik mereka. Inti dari pandangan tersebut adalah adanya dorongan dan keinginan agar setiap proses hukum terkait korupsi dijalankan secara semestinya. Hal ini berarti proses penegakan hukum harus berjalan demi dan untuk keadilan itu sendiri, dilakukan secara adil, serta bebas dari pretensi atau kepentingan tersembunyi di baliknya. Melalui jurnalistik pula sebagai wadah bagi *Tempo* untuk mewujudkan visi dan misinya dalam pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, mengenai proses liputan berita kasus korupsi. Ricky menjelaskan bahwa proses pemilihan berita korupsi di *Tempo* tidak berfokus pada tema, melainkan pada penggunaan elemen-elemen dasar jurnalistik untuk menilai kelayakan suatu peristiwa. Menurutnya, setiap peristiwa diukur menggunakan parameter seperti aktualitas, kedekatan (*proximity*), pengaruh (*magnitude*), dan lain-lain. Pertimbangan utama redaksi dalam menilai setiap peristiwa didasari cakupan segmentasi pembaca sesuai dengan posisi *Tempo* sebagai media skala nasional. Oleh karena itu, *Tempo* cenderung memprioritaskan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau figur publik yang dikenal luas karena dinilai memiliki daya tarik dan keterkaitan yang lebih besar bagi pembaca.

Pada pemberitaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian, *Tempo* selektif dalam menentukan penonjolan isu utamanya.

“Kalau penonjolan itu tentu kita pasti akan lebih selektif memilih isu apa yang kira-kira temuannya paling menohok.”

Adapun pertimbangan awalnya adalah untuk menjawab rasa ingin tahu publik dan *Tempo* memiliki peranan untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut.

“...orang pasti akan bertanya-tanya di mana letak kesalahannya Syahrul. Jadi petunjuk apa yang diperoleh oleh KPK saat itu hingga sampai pada kesimpulan untuk menetapkan status tersangka dan kemudian berujung pada penahanan yang bersangkutan. Itu kan pertanyaan yang pasti muncul bukan semata-mata apa yang menjadi screening dan kepentingan Tempo, tapi pembaca di luar sana juga pasti akan memiliki pertanyaan yang sama. Nah media, termasuk Tempo, kemudian memiliki concern juga untuk melayani rasa ingin tahu orang di luar sana tentang isu itu.”

Lebih lanjut bahwa penonjolan isu juga bersifat dinamis mengikuti perkembangan kasus. Oleh sebab itu, fokus berita ditentukan oleh fakta dan peristiwanya itu sendiri.

“Tiba-tiba kita dapat petunjuk bahwa di rumahnya si SYL itu ternyata ditemukan beberapa duit, ada catatan transaksi, yang itu belum sempat kita beritakan. Berarti nanti heavy pemberitaannya itu akan mengolah soal temuan-temuan hasil penggeledahan, soal uang-uang di rumah itu, itu sumbernya dari mana, mau diperuntukkan sebagai apa, dan lain-lain. Jadi tergantung dari peristiwanya sendiri.”

Fokus berita akan ditentukan oleh fakta dan peristiwanya itu sendiri. Kemudian, Ricky mengatakan bahwa *Tempo* memiliki beberapa prioritas narasumber sekaligus pertimbangan memilih mereka untuk diwawancarai.

“Peristiwa hanya memiliki bobot informasi dalam derajat yang paling meyakinkan ketika dia diceritakan oleh pelaku... Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ada dalam level pelaku. Artinya dia mengetahui betul peristiwanya, bukan katanya-katanya... Kedua adalah saksi mata. Orang yang menyaksikan langsung peristiwa itu... Di grade lanjutannya ada orang yang memiliki otoritas untuk menggali peristiwa itu. Penegak hukum. Bisa polisi, bisa kejaksaan... Grade yang paling rendah itu pengamat. Nggak terlalu penting penjelasan mereka, tapi kadang-kadang diperlukan hanya untuk memberikan perspektif terhadap isu.”

Ia juga mengambil contoh dari kasus korupsi Kementerian Pertanian dalam memilih narasumber.

“Kalau misalnya kita harus mengangkat liputan soal kasus Syahrul Yasin Limpo, pasti kita akan ngejar kesaksian langsung dari SYL... Bisa juga kemudian kesaksiannya, bisa dari pengacara yang bersangkutan. Bisa juga kadang-kadang untuk beberapa isu, misalnya teman-teman jurnalis itu punya kedekatan dengan penyidik di polisi, di KPK, di kejaksaan, yang dia tahu proses penggeledahan itu... Meskipun sebenarnya mereka nggak punya kompetensi dan kewenangan buat memberikan statement kepada publik, kepada media. Tapi cerita yang bisa kita dapat dari mereka itu menarik.

Karena mereka yang berhubungan langsung dengan peristiwa, dia yang datengin rumah SYL, dia yang geledah, dia yang ngitung uang, lebih paham dia ketimbang pimpinan KPK yang cuma nerima laporan di kantor.”

Namun terkadang dalam proses wawancara terdapat narasumber yang tidak tidak bisa diwawancarai dengan alasan yang beragam. Untuk hal itu, *Tempo* melakukan beberapa hal, yaitu mencari narasumber pengganti yang kredibel dan relevan, serta mengandalkan dokumen-dokumen resmi. Adapun beberapa hal yang juga bisa menjadi tantangan dalam meliput kasus korupsi.

Yang paling lazim itu biasanya ya kalau misalnya perkara pidana itu seringkali penegak hukum itu kan tidak membuka secara gamblang temuan mereka kepada media. Ya Lebih karena kadang-kadang karena pertimbangan strategi penyidikan. Mereka nggak mau kemudian temuan-temuan mereka dieksplor secara vulgar, karena khawatir boleh jadi pelaku pidana bisa membuat semacam skenario atau semacam pembelaan dan bantahan atas tuduhan. Kare-na mereka tahu ternyata penegak hukum itu mau menyeret dia lewat temuan ini, lewat bukti ini, lewat kesaksian ini. Jadi seringkali di awal-awal perkara itu muncul, KPK, kejaksan itu hanya memberikan gambaran secara general saja perkaranya itu seperti apa, nggak detail. Tantangannya itu bagaimana kemudian kita mendalami isu itu dari pihak-pihak yang langsung berkepentingan dengan perkara korupsi itu.

Di akhir wawancara, peneliti mencoba meminta pendapat mengenai temuan *framing* dalam penelitian ini. Seperti halnya pada elemen *define problems* dan *diagnose causes* tentang adanya nuansa politis dibalik kasus korupsi Kementerian Pertanian dalam salah satu berita Majalah *Tempo*, dimana Ricky membenarkan hal tersebut.

“Persis. Jadi proses hukum itu tidak lepas dari konfigurasi politik skala nasional yang saat itu lagi panas-panasnya... Jadi itu menjadi kritiknya Tempo terhadap penegakan hukum saat itu. Bahwa perkara ini adalah penegakan hukum, yang perkaranya memperlihatkan adanya skandal oleh pejabat negara terkait pengelolaan anggaran, suap, dan lain-lain. Juga bukan pilihan yang sepatutnya diapresiasi, karena penegak hukumnya juga tidak steril dari intervensi politik. Ada nuansa, ketika itu, bahwa proses hukum yang terjadi di kejaksan, di polisi, maupun di KPK itu memang, operasi untuk menyandera tokoh-tokoh tertentu dari partai politik, yang bersebarangan dengan rezim saat itu. Itu juga bagian dari kritik kita.”

Sementara itu mengenai temuan pada elemen *make moral judgement*, ia memberikan pendapat yang berbeda.

“Pertama, kalau soal moral judgment itu sebenarnya wilayah yang ada di wilayah pembaca. Dunia persepsi yang ada pada pikiran pembaca... Nggak perlu kita, media memposisikan diri sebagai sumber moralitas gitu loh. Bukan itu yang menjadi oritentasi dalam bermedia, meskipun orang-orang

di internal Tempo memiliki frame dalam melihat aspek moralitas itu sendiri, tapi itu bukan dasarnya.”

Terakhir, yaitu tanggapan mengenai elemen *treatment recommendation* yang juga diberikan oleh jurnalis *Tempo* tersebut.

“Kalo eksplisit dan implisit. Jadi gini ada larangan dan ada kelonggaran yang dimiliki media untuk beropini. Berita sebuah artikel entah di platform apapun baik itu di online, di cetak itu ya. Itu haram opininya untuk beropini. Kita tidak boleh tuh mencampur adukkan. Bahkan pemilihan diksi saja sudah mempengaruhi ada wilayah opini atau enggak. Itu bisa menjadi permasalahan serius di dewan pers jika bersengketa. Tapi ada ruang tertentu yang memungkinkan berdasarkan aturan, yang dimungkinkan menurut aturan, membuat media itu bisa mengungkapkan standing position, penilaian terhadap masalah itu. Dimana itu? Ya di rubrik tajuk. Di rubrik opini. Media mau menilai dengan cara apapun ya bebas. Memang itu ruang yang diatur oleh kode etik.”

Wawancara dengan Redaktur dan Jurnalis *Desk Hukum Tempo*, Riky Ferdianto berfungsi sebagai validasi empiris dan kontekstualisasi kebijakan serta proses produksi berita yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat temuan analisis framing yang dihasilkan dari teks berita. Wawancara ini secara logis diperlukan untuk mengonfirmasi intensi redaksional di balik temuan framing, misalnya nuansa politis dalam kasus SYL. Lalu, mengungkap kebijakan redaksi dan nilai-nilai fundamental *Tempo* dalam memandu proses produksi berita. Terakhir, menjelaskan secara langsung perbedaan signifikan dalam proses jurnalistik dan prioritas penonjolan isu antara platform Majalah *Tempo* dan Media Online *Tempo.co* sehingga hasil analisis data menjadi kaya dan memiliki dukungan langsung dari sumber internal.

D. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sopian Tamrin, Fadhillah Sri Meutia, dan Imam Malik Riduan (2024) dengan judul *Framing Analysis of Syahrul Yasin Limpo Corruption Case in Online Media*. Penelitian ini bertujuan memetakan keragaman pembingkai di empat media online terkemuka, yaitu *Detik.com*, *Kompas.com*, *Liputan6.com*, dan *CNBC Indonesia*. Temuan utamanya menunjukkan bahwa setiap media memiliki bingkai yang khas: *Detik.com* menonjolkan drama sensasional, *Kompas.com* cenderung faktual dan netral, *Liputan6.com* memberi ruang pada pembelaan SYL, sementara *CNBC Indonesia* mengambil pendekatan

investigatif dengan merinci pelanggaran yang ada. Penelitian ini berhasil menyajikan gambaran umum tentang bagaimana media-media arus utama membingkai kasus korupsi SYL secara beragam.

Selanjutnya, penelitian oleh Ahmad Fauzan Akbar, Nabilah, dan Muhammad Damar Ramadhan (2024) yang berjudul *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo di Kompas.com*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Kompas.com* secara konsisten membingkai kasus ini sebagai masalah hukum. Fokus pemberitaannya terletak pada fakta, kronologi peristiwa, dan proses peradilan yang sedang berjalan. Media ini dinilai berupaya menjaga objektivitasnya dengan menyoroti berbagai pihak yang terlibat, tidak hanya SYL seorang.

Penelitian lain yang menjadi pembanding adalah karya Tasya Lee Maharani dan Nawiroh Vera (2023) berjudul *Framing Analysis of the Suspected Corruption Case of Agriculture Minister Syahrul Yasin Limpo*. Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada pemberitaan *Detik.com* pada periode waktu yang sangat spesifik dan krusial, yaitu momen penangkapan SYL. Temuan utamanya adalah *Detik.com* membingkai berita untuk menonjolkan tindakan tegas KPK dan membangun justifikasi atas penangkapan tersebut sebagai konsekuensi dari sikap SYL yang dinilai tidak kooperatif.

Adapun kesamaan antara penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu terletak pada beberapa aspek. Pertama, seluruh penelitian sama-sama menjadikan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo sebagai objek peristiwa yang dianalisis. Kedua, secara metodologis sama-sama mengandalkan model analisis *framing* model Robert N. Entman sebagai pisau analisis utama. Hal ini mengindikasikan relevansi model tersebut dalam studi media di Indonesia. Selain itu, terdapat irisan temuan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian dari Maharani & Vera (2023) yang menyimpulkan bahwa *Detik.com* menonjolkan ketegasan KPK, sejalan dengan temuan penelitian ini pada *Tempo.co* yang juga mendefinisikan masalah sebagai tindakan hukum tegas oleh KPK. Demikian pula, dengan penelitian Akbar, dkk. (2024) bahwa *Kompas.com* membingkai kasus sebagai masalah hukum memiliki kesamaan dengan salah satu frame yang ditemukan pada *Tempo.co*.

Sementara perbedaan utama terletak pada objek media dan kedalaman analisis. Pertama, penelitian ini memilih dua platform berbeda, yakni Majalah *Tempo* dan Media Online *Tempo.co* sebagai objek penelitian. Hal ini berbeda dengan penelitian Tamrin, dkk. (2024), Akbar, dkk. (2024), serta Maharani & Vera (2023)

yang hanya berfokus pada media online saja seperti *Detik.com* dan *Kompas.com* dengan kecenderungan gaya pemberitaan yang berbeda. Pilihan ini memungkinkan penelitian untuk menggali lapisan makna dan bingkai yang lebih kompleks dan kritis.

Kedua, penelitian ini menghadirkan analisis komparatif antara dua platform yang menjadi objek penelitian. Pemberitaan media *online Tempo.co* yang bersifat cepat dan reaktif, dengan Majalah *Tempo* yang menyajikan laporan mendalam secara periodik. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan di antara keduanya. *Tempo.co* menyajikan *framing* yang lebih beragam dan reaktif terhadap perkembangan harian, seperti penangkapan, gugatan praperadilan, dan perang pernyataan. Sementara Majalah *Tempo* membangun *framing* yang jauh lebih dalam dan bersifat sistemik. Isu tidak hanya dilihat sebagai korupsi oleh seorang individu, melainkan sebagai masalah institusional yang turut menyeret integritas lembaga penegak hukum itu sendiri. Perbedaan *framing* antara *Tempo.co* dan Majalah *Tempo* ini merupakan temuan yang tidak diungkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yang hanya menganalisis satu jenis platform media saja.

Ketiga, penilaian moral pada penelitian Akbar, dkk (2024) cenderung berfokus pada kesalahan SYL, sedangkan penelitian Maharani & Vera (2023) berfokus pada ketegasan KPK. Hal ini berbeda dengan penelitian ini, yang mengungkap penilaian moral Majalah *Tempo* tidak hanya diarahkan pada SYL, tetapi juga pada kegagalan sistemik dan krisis integritas di tubuh KPK. Diagnosis penyebab pun lebih struktural, menyoroti adanya dugaan konflik internal dan peran internal di KPK, sebuah analisis yang tidak muncul dalam penelitian terdahulu. Terakhir, dalam penelitian ini terdapat wawancara dengan pihak redaksi. Metode ini yang tidak digunakan dalam penelitian pembandingan sehingga dapat memberikan validasi dan memperkaya analisis *framing* yang dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis *framing* terhadap pemberitaan kasus korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Majalah *Tempo* dan media online *Tempo.co*, terdapat perbedaan mendasar antara *Tempo.co* dan Majalah *Tempo* dalam hal melakukan seleksi isu dan penonjolan isu yang ditampilkan. *Tempo.co*, sebagai media online cenderung menyajikan secara reaktif dan cepat. Seleksi isunya berfokus pada peristiwa-peristiwa harian yang memiliki nilai berita tinggi, seperti penangkapan, penetapan tersangka, gugatan praperadilan, dan perang pernyataan antar pihak. Penonjolan isu dilakukan melalui penggunaan judul yang lugas, kutipan langsung dari sumber otoritas, dan penyajian kronologi yang runtut untuk menjawab kebutuhan informasi pembaca secara cepat.

Majalah *Tempo*, sebagai media yang terbit sekali dalam sepekan, cenderung menyajikan seleksi isu yang lebih mendalam dan bersifat sistemik. Fokusnya tidak hanya pada tindakan korupsi SYL, tetapi juga pada isu-isu turunan yang lebih kompleks, seperti dugaan kebocoran dokumen penyelidikan, potensi perintangan penyelidikan (*obstruction of justice*), serta konflik internal dan dugaan pemerasan di tubuh KPK sendiri. Penonjolan isu dilakukan dengan menyajikan temuan investigatif, data spesifik, seperti nominal uang, foto dokumen yang dihancurkan, serta narasi yang mengonfrontasi bantahan narasumber dengan bukti yang ada.

Perbedaan fundamental ini dapat dipahami dari sifat dan sumber daya yang dibutuhkan dalam peliputan investigatif. Sebagaimana dijelaskan dalam buku saku dari Transparency International Indonesia, peliputan berita korupsi, apalagi dalam bentuk investigasi, membutuhkan komitmen tidak hanya dari jurnalis, namun juga editor/redaktur serta pemilik medianya. Penulisan investigasi isu korupsi membutuhkan waktu yang tidak singkat. Kompetensi dari jurnalis yang mumpuni serta berintegritas dan memerlukan dana yang tidak sedikit (Trianita & Muzzammil, 2023). Hal ini menjelaskan mengapa Majalah *Tempo*, dengan siklus mingguan dan fokus investigasi, mampu menghasilkan narasi yang lebih komprehensif dibandingkan *Tempo.co* yang dituntut kecepatan.

Secara umum, konstruksi realitas oleh kedua media melalui empat perangkat *framing* Entman menunjukkan perbedaan kedalaman. Dalam mendefinisikan

masalah (*define problems*), *Tempo.co* fokus pada tindakan hukum yang tegas oleh KPK, sementara Majalah *Tempo* memperluasnya menjadi krisis integritas institusi dan dugaan politisasi hukum. Terkait diagnosis penyebab (*diagnose causes*), *Tempo.co* menunjuk pada tindakan personal SYL, sedangkan Majalah *Tempo* menganalisis penyebab yang lebih struktural seperti sistem setoran di kementerian dan konfigurasi politik nasional. Penilaian moral (*make moral judgement*) di *Tempo.co* cenderung implisit melalui penjajaran fakta, berbeda dengan Majalah *Tempo* yang menyajikannya secara eksplisit dan arah yang berbeda-beda, kritik tidak hanya terhadap SYL tetapi juga integritas pimpinan KPK dan komitmen Partai NasDem. Terakhir, rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) dari kedua media mendukung proses hukum, namun *Tempo.co* menekankan pada langkah prosedural KPK, sementara Majalah *Tempo* merekomendasikan penegakan hukum paralel yang juga mengusut dugaan pemerasan di internal KPK oleh Kepolisian.

Terakhir, mengenai kebijakan redaksi *Tempo* dalam pemberitaan kasus korupsi, berlandaskan pada nilai-nilai dasar, seperti penghargaan terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum, dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Redaksi tidak menerima informasi dari penegak hukum secara mentah, melainkan mengujinya secara kritis melalui rapat redaksi. Dalam memilih narasumber, *Tempo* memprioritaskan mereka yang terlibat langsung dalam peristiwa, baik itu pelaku dan saksi mata. Kedudukannya di atas sumber otoritas dan pengamat untuk mendapatkan informasi yang paling akurat. Penonjolan isu bersifat dinamis, ditentukan oleh temuan di lapangan yang dianggap paling signifikan dan dapat menjawab rasa ingin tahu publik.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki serta menyempurnakan penelitian serupa di masa mendatang.

1. Keterbatasan Periode Berita: Pemberitaan yang diteliti dalam penelitian ini pada rentang waktu yang terbatas yaitu September hingga Oktober 2023. sedangkan pemberitaan tentang kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo ini masih berlanjut setelahnya. Selain itu dari pemberitaan yang diambil hanya selama rentang waktu satu bulan tersebut, tidak semua dapat dianalisis sehingga berita yang terpilih belum tentu mewakili keseluruhan berita yang ada.

2. Keterbatasan Fokus Analisis: Penelitian ini berfokus pada analisis teks berita (produksi pesan) dan belum menyentuh aspek resepsi atau dampak pemberitaan tersebut terhadap audiens. Bagaimana pembaca dari kedua platform media memaknai dan merespons *framing* yang berbeda merupakan area yang belum terjamah dalam penelitian ini. Kebijakan redaksional dari *Tempo* tidak dieksplorasi lebih jauh.
3. Keterbatasan Cakupan Narasumber dan Data: Wawancara hanya dilakukan dengan satu perwakilan dari redaksi *Tempo*. Meskipun informatif, pandangan dari reporter atau editor lain bisa memberikan perspektif yang lebih kaya mengenai dinamika ruang redaksi. Selain itu, penelitian ini tidak menganalisis dokumen-dokumen primer seperti surat perintah penyidikan atau berkas perkara yang bisa memberikan konteks hukum yang lebih mendalam.

C. Saran

1. Bagi media massa secara umum disarankan untuk tidak hanya berperan sebagai "corong" bagi lembaga penegak hukum. Pemberitaan korupsi akan lebih berdampak jika disertai dengan proses investigasi yang mendalam, yaitu dengan memberikan konteks yang utuh termasuk potensi dibalik kasus, melakukan verifikasi silang, dan berani mengawasi semua pihak yang terlibat dalam sebuah kasus, termasuk integritas lembaga penegak hukum itu sendiri, sebagaimana yang dicontohkan oleh Majalah *Tempo*.
2. Bagi penelitian selanjutnya terkait dengan isu serupa, disarankan untuk menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda guna memperkaya pemahaman.
 - a. Analisis Resepsi: Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada bagaimana pembaca menerima, menafsirkan, dan menegosiasikan makna dari *framing* berita korupsi yang disajikan media. Ini akan melengkapi analisis produksi pesan dengan analisis konsumsi pesan.
 - b. Analisis Wacana Kritis: Selain analisis *framing*, penggunaan analisis wacana kritis dapat menggali lebih dalam bagaimana kekuasaan, dominasi, dan ideologi direproduksi melalui pilihan kata, tata bahasa, dan struktur teks dalam pemberitaan kasus korupsi.

- c. Studi Etnografi Ruang Redaksi: Untuk memahami proses pembingkai berita secara lebih komprehensif, penelitian etnografi dengan melakukan observasi partisipatoris di dalam ruang redaksi dapat menjadi pilihan. Metode ini dapat mengungkap dinamika, ideologi, dan proses pengambilan keputusan yang tidak terungkap hanya melalui wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, A., & Permana, R. S. M. (2017). *Peliputan Korupsi Pada Media Massa Dalam Mediamorfosa: Transformasi Media Komunikasi Di Indonesia*. ASPIKOM dan Buku Litera Yogyakarta.
- Eriyanto. (2021). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami., & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York University Press.
- Nurhadi, Z. F. (2015). *Teori-Teori Komunikasi: Teori Komunikasi Dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Santana K., S. (2017). *Jurnalisme Kontemporer (Edisi Kedua)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Trianita, L., & Muzzammil, S. (2023). *Buku Saku Jurnalis Meliput Korupsi*. Transparency International Indonesia.
- Trianton, T. (2016). *Jurnalistik Komprehensif*. Penerbit Ombak.
- Ward, M. (2002). *Journalism Online*. Focal Press.
- Wijayanto, & Zachrie, R. (2009). *Korupsi Mengkorupsi Indonesia, Sebab, Akibat Dan Prospek Pemberantasan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal

- Ananda, M. F. S., Nugraha, A. R., & Sumartias, S. (2019). *Analisis Framing Pemberitaan Korupsi Massal Di Media Online Detik.com*. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal Of Communications Studies)*, 3(2), 253.
<https://doi.org/10.25139/jsk.v3i2.1464>
- Bungsu, A. P., & Muzakir, F. (2023). *Analisis Framing Kasus Korupsi Menteri Kominfo Johnny G. Plate*. *Journal Of Da'wah*, 2(1), 132-149.
<https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2813>
- Deha, D., & Syas, M. (2021). *Relasi Media, Pemerintah, Dan Publik (Analisis Framing Dan Strukturasi Pada Majalah Tempo)*. *Jurnal Signal*, 9(1), 67-88.

- Fauzan Akbar, A., Nabilah, & Muhammad Damar Ramadhan. (2024). *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo Di Kompas.com. Jurnalistik Dan Media*, 2(2), 76–84. <https://doi.org/10.32722/jjm.v2i2.6847>
- Hildansyah, I., Nur, M. J., & Pauji, R. R. (2022). *Ketua KPK Dalam Bingkai Media Pada Kasus Korupsi Gubernur Papua Di Media CNNIndonesia.com Dan Detik.com. Jurnal Common*, 6(2), 167-178. <https://doi.org/10.34010/common.v6i2.8646>
- Kusuma, A. (2017). *Framing Media Massa Di Indonesia: Studi Kasus Pemberitaan Politik. Jurnal Media Dan Komunikasi*, 5(2), 100-120.
- Leliana, I., Herry, H., Suratriadi, P., & Enrieco, E. (2021). *Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.com Dan BBCIndonesia.com. Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 21(1), 60-67. <https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.10042>
- Maharani, T. L., & Vera, N. (2023). *Framing Analysis Of The Suspected Corruption Case Of Agriculture Minister Syahrul Yasin Limpo. International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*, 06(12). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i12-04>
- Meilasari, S. H., & Wahid, U. (2020). *Analisis Resepsi Khalayak Terhadap Isi Pesan Pada Iklan Wardah Cosmetics “Long Lasting Lipstic Feel The Color”. Jurnal Komunikasi*, 11(1), 1-8. <https://doi.org/10.31294/jkom.v11i1.6810>
- Natalia, D. L. (2019). *Media Massa Dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 57-73.
- Norris, P. (2006). *The Role Of The Free Press In Promoting Democratization, Good Governance And Human Development. In Media Matters: Perspectives On Advancing Governance & Development.*
- Norris, P. (2006). *The Role Of The Free Press In Promoting Democratization, Good Governance, And Human Development. In Midwest Political Science Association Annual Meeting* (pp. 20-22).
- Nurhajati, L., & Wijayanto, X. A. (2019). *Kepemilikan Media Dan Isi Pemberitaan Koran Tempo. Jurnal Pewarta Indonesia*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.25008/jpi.v1i1.1>
- Picard, R. G., & Lowe, G. F. (2016). *Redefining Media Management In Modern Journalism.* Routledge.
- Rahardjo, S. (2019). *Pengambilan Keputusan Dalam Jurnalistik Modern. Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 70-80.

- Setiawan, H., & Harnia, N. T. (2021). *Analisis Framing Pemberitaan Vonis Koruptor Pada Media Online Suara.com Dan Kompas.com. Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Undiksha*, 11(4), 473-481. <https://doi.org/10.23887/jjpbs.v11i4.41136>
- Sovianti, R. (2019). *Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto Di Media Daring Detik.com Dan Kompas.com. Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan (KOMASKAM)*, 1(1), 47-61.
- Sumarkidjo, A. (2013). *Pers Nasional, Pilar Satu-Satunya Yang Konsisten Anti-Korupsi. Jurnal Visi Komunikasi*, 12(1), 65-81. <https://dx.doi.org/10.22441/visikom.v12i1.367>
- Susilo, A. (2020). *Struktur Organisasi Dalam Manajemen Redaksi. Jurnal Komunikasi*, 15(1), 80-90.
- Tamrin, S., Meutia, F. S., & Riduan, I. M. (2024). *Framing Analysis Of Syahrul Yasin Limpo Corruption Case In Online Media. JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(4), 538-555. <https://doi.org/10.26618/jed.v9i4.16282>
- Van Yusat, M. F., & Setiawan, H. (2022). *Analisis Framing Berita Pegawai Pajak Korupsi Pada Surat Kabar Kompas.com Dan Detikfinance. Kajian Linguistik Dan Sastra*, 7(1), 70-91. <https://doi.org/10.23917/cls.v7i1.16392>
- Yogadiasti, N. I., & Nazaruddin, M. (2016). *Analisis Framing Berita Meninggalnya Mantan Presiden Soeharto Di Majalah Tempo Dan Gatra. Jurnal Komunikasi*, 3(1), 71-84. <https://journal.uui.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/6297>

Artikel Internet

- Rassat, F. S. (2023). *KPK Terima 2.707 Laporan Dugaan Korupsi Pada Semester I 2023. Antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/3681144/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023>
- TI Indonesia (2023). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022: Korupsi, Konflik, Dan Keamanan. TI.or.id*. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

Wawancara *Tempo* (Rabu, 25 Juni 2025)

A. Identitas Narasumber

Nama Lengkap : Riky Ferdianto

Jabatan : Redaktur dan Jurnalis *Desk* Hukum

B. Pertanyaan Mengenai Kebijakan Redaksi *Tempo*

1. Apa prinsip utama yang dipegang oleh *Tempo* dalam kebijakan redaksi? Jawaban : Ya, kalau *Tempo* itu kan, ya kita bermedia itu memang berpegang pada value lah ya, nilai-nilai dasar yang itu menjadi semacam acuan kita dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik. Beberapa diantaranya itu penghargaan terhadap hak asasi manusia, penyelenggaraan *good and clean governance and corporate*, gitu ya. Lalu juga soal penegakan hukum, soal prinsip dalam negara demokratis, hal-hal seperti itu menjadi kerangka berpikir yang kemudian menjadi guideline, panduan kita dalam membingkai sebuah peristiwa. Jadi peristiwa tentu banyak berserakan ya, terjadi di banyak tempat. Tapi cara kita mengemas isu, mendekati suatu masalah itu harus berangkat dari value itu lah. Dan itu juga kenapa ketika *Tempo* memutuskan untuk mengangkat pendalaman isu terkait dengan kasus korupsi di Kementan yang waktu itu perkaranya ditangani oleh KPK, itu menjadi relevan dan layak untuk di *highlight* karena itu hal yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan *good and clean governance* tadi. Tentu siapapun berharap bahwa cara kita bernegara, penyelenggaraan, pemerintahan, para penyelenggara pemerintah itu harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, menghindari *conflict of interest*, keharusan untuk bekerja sesuai dengan dasar dan ketentuan undang-undang, nggak boleh korupsi, dan lain-lain.
2. Bagaimana prinsip tersebut mempengaruhi ruang redaksi? Jawaban : Itu tadi seperti yang saya singgung di awal, kalau berbicara tentang isu itu sendiri, artinya pasti ketika perencanaan dalam forum-forum rapat redaksi itu kita selalu akan ditanyakan. Ketika terjadi peristiwa penyidikan perkara di lembaga penegak hukum, baik itu KPK, kejaksaan, maupun kepolisian, itu selalu akan ditanyakan. Ini perkara, substansinya apa? Kenapa ada seseorang yang kemudian jadi target penyelidikan atau penyidikan? Kenapa? Apa yang menjadi dasar penegak hukum untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang? Dan itu pasti akan jadi PR

dan pekerjaan besar buat teman-teman di *Tempo*, terutama di kompartemen hukum dan kriminalitas, karena saya mengampu isu kompartemen itu. Teman-teman pasti akan disodorkan pertanyaan yang relevan terkait dengan seluk-seluk perkara itu. Kalau memang dia ditetapkan sebagai tersangka, pasti nanti lanjutan pertanyaannya, kejahatan apa yang dilakukan, bagaimana modusnya, siapa yang dirugikan, siapa saja yang terlibat, kapan peristiwanya, dan lain-lain.

3. Bagaimana visi dan misi *Tempo* dalam hal pemberantasan korupsi? Jawaban : Ya, kalo ngomong soal visi dan misi, sebenarnya juga nggak pernah dideklarasikan secara eksplisit. Tapi pandangan frame secara umum, orang pasti punya dorongan dan keinginan bahwa proses hukum itu harus dijalankan secara *proper* ya. Memang berjalan demi dan untuk penegakan hukum itu sendiri, lalu dilakukan dengan adil, tidak ada pretensi kepentingan dibalik itu. Lalu dengan jurnalistik ini sebagai Upaya *Tempo* dalam memberantas korupsi melalui liputan investigatif. *Tempo* juga berperan menjadi platform bagi suara-suara kritis antikorupsi dan edukasi publik tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan. Kami bertekad untuk terus menjadi mata dan telinga publik, melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik penyelenggaraan negara.

C. Pertanyaan Mengenai Proses Liputan Berita Kasus Korupsi

1. Apa saja tema pemberitaan *Tempo* dalam pemberitaan kasus korupsi? Apa pertimbangan pemilihan tema tersebut? Jawaban : Bukan tema ya. Kalau menurut saya lebih kepada unsur yang paling basic dalam teori komunikasi. Apa yang membuat sebuah berita itu menjadi relevan dan layak untuk diekspos itu kan pasti ada parameternya. Elemen-elemen jurnalistik itu pasti akan menuntut para jurnalis itu untuk mengedepankan soal aktualitas, magnitude, proximity, fact, dan lain-lain. Jadi karena pakem itulah, kemudian sebuah peristiwa pasti akan dinilai dengan parameter itu. Kalau ngomong soal banjir di Jakarta, buat orang Papua mungkin belum tentu menarik. Tapi kalau ada banjir di Merauke, mungkin itu isu yang seksi dan mungkin akan dibaca oleh orang-orang di Papua. Apa penyebabnya? Parameter apa yang sedang berbicara di situ? Masalah proximity, kedekatan peristiwa. Engagement pembaca dengan peristiwa itu menjadi terbangun karena mereka merasa punya kedekatan dengan orang-orang atau daerah yang dia kenal. Dalam kasus korupsi misalnya, saya yakin di banyak tempat, banyak penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa. Tapi

mungkin yang menjadi target penyidikannya boleh jadi diantara itu. Katakanlah ada kepala desa, atau mungkin camat, atau perusahaan di daerah apa, yang belum tentu itu diketahui oleh orang secara luas. Jadi kalau berbicara soal parameter, tentu *Tempo* itu juga harus menakar peristiwa. Sebuah peristiwa itu berdasarkan cakupan segmentasi pembacanya. Karena kita itu memang menetapkan posisi, positioning-nya kita itu sebagai media yang coverage-nya itu sebagai media yang skala nasional, tentu orang-orang di level kebijakan, orang-orang yang memiliki kedudukan penting di pemerintahan yang dikenal secara luas itu menjadi menarik untuk dijadikan sorotan.

2. Siapa narasumber yang menjadi prioritas untuk diwawancarai? Apa pertimbangan pemilihan narasumber? Jawaban : Hal yang paling mendasar dalam kerja jurnalistik itu adalah mendekati peristiwa itu lewat orang-orang yang memang menjadi prioritas dalam penggalan informasi. Jadi gini, harus dibahasakan dalam pengertian yang lebih general. Peristiwa hanya memiliki bobot informasi dalam derajat yang paling meyakinkan ketika dia diceritakan oleh pelaku. Ada sebuah rapat berbicara soal skenario buat menggarung anggaran di kementerian apa. Rapat itu dihadiri oleh 10 orang. Ada 1-2 orang mau bercerita sama kita, dan dia ada di dalam rapat tersebut. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ada dalam level pelaku. Artinya dia mengetahui betul peristiwanya, bukan katanya-katanya. Ada 10 orang itu, terus temannya. Dapat penjelasan dari 10 orang yang rapat itu. Itu sumber kedua jadwalnya. Jadi bukan sumber utama yang layak buat dipegang. Kedua adalah saksi mata. Orang yang menyaksikan langsung peristiwa itu. Ada peristiwa pemerkosaan. Ada orang yang melihat, menyaksikan, atau mungkin mendokumentasikan. Kesaksian dia menjadi relevan, karena dia berada dalam sebuah peristiwa itu. Di grade lanjutannya ada orang yang memiliki otoritas untuk menggali peristiwa itu. Penegak hukum. Bisa polisi, bisa kejaksaan. Atau bisa juga mungkin pengacara dari pelaku atau terdakwa. Grade yang paling rendah itu pengamat. Nggak terlalu penting penjelasan mereka, tapi kadang-kadang diperlukan hanya untuk memberikan perspektif terhadap isu. Parameter itu kemudian tentu bisa dijabarkan dalam kerja jurnalistik. Kalau misalnya kita harus mengangkat liputan soal kasus Syahrul Yasin Limpo, pasti kita akan ngejar kesaksian langsung dari SYL. Dia keluar dari gedung KPK, kita tanyain dia. Itu gimana Pak? Bapak dituduh korupsi ini, ini, ini. Dari mana uangnya? Atau segala macam. Apapun

penjelasan yang kita dapat dari SYL itu menjadi relevan. Untuk dieksplor dan diberikan panggung pemberitaan secara proporsional. Bisa juga kemudian kesaksiannya, bisa dari pengacara yang bersangkutan. Bisa juga kadang-kadang untuk beberapa isu, misalnya teman-teman jurnalis itu punya kedekatan dengan penyidik di polisi, di KPK, di kejaksaan, yang dia tahu proses penggeledahan itu. Kita deketin, kita ajak ngobrol. Meskipun sebenarnya mereka nggak punya kompetensi dan kewenangan buat memberikan statement kepada publik, kepada media. Tapi cerita yang bisa kita dapat dari mereka itu menarik. Kenapa? Karena mereka yang berhubungan langsung dengan peristiwa, dia yang datangin rumah SYL, dia yang geledah, dia yang ngitung uang, lebih paham dia ketimbang pimpinan KPK yang cuma nerima laporan di kantor.

3. Apa tantangan dalam liputan kasus korupsi? Jawaban : Yang paling lazim itu biasanya ya kalau misalnya perkara pidana itu seringkali penegak hukum itu kan tidak membuka secara gamblang temuan mereka kepada media. Ya lebih karena kadang-kadang karena pertimbangan strategi penyidikan. Mereka nggak mau kemudian temuan-temuan mereka dieksplor secara vulgar, karena khawatir boleh jadi pelaku pidana bisa membuat semacam skenario atau semacam pembelaan dan bantahan atas tuduhan. Karena mereka tahu ternyata penegak hukum itu mau menyeret dia lewat temuan ini, lewat bukti ini, lewat kesaksian ini. Jadi seringkali di awal-awal perkara itu muncul, KPK, kejaksaan itu hanya memberikan gambaran secara general saja perkaranya itu seperti apa, nggak detail. Tantangannya itu bagaimana kemudian kita mendalami isu itu dari pihak-pihak yang langsung berkepentingan dengan perkara korupsi itu. Kalau misalnya ada indikasi bahwa si Menteri ini menerima uang suap terkait dengan proyek pengadaan apa yang kemudian dimenangkan oleh PT. ABC, maka perusahaan-perusahaan itu harus kita dalemin. Harus kita kejar. Yang boleh jadi, ketika ekspos perkara dilakukan oleh KPK, nama-nama mereka nggak pernah disebut, tapi itu adalah inisiatif dari media sendiri untuk memperkaya bahan yang sudah kita dapat di lapangan. Jadi kita nggak bergantung semata-mata kepada penjelasan penegak hukum saja.
4. Bagaimana pembagian berita kasus korupsi antara *Tempo* versi online, versi cetak/majalah, dan YouTube? Jawaban : Pembedanya itu mungkin ini, kalau di online itu kan yang dituntut itu adalah kecepatan dalam membuat berita, berita-berita straight news, tiba-tiba ada konferensi pers terkait penggeledahan, terkait

dengan penangkapan, terkait dengan penerbitan, terkait dengan segala macam. Straight news itu memang kecenderungannya ingin memberitakan sesuatu secepat mungkin. Yang boleh jadi beritanya itu juga buat para pembaca yang tidak mengikuti isu itu secara berkala, secara konsisten, mereka mungkin akan kehilangan perspektif dan nggak punya pemahaman yang utuh terhadap peristiwa itu. Katakanlah dalam sehari, *Tempo* bikin tulisan soal SYL, ada 12 artikel. Gilang boleh jadi cuma sempat baca 2 atau 3. Dan isu itu, kemudian baru muncul lagi di hari ke-2, hari ke-3, setelah KPK ternyata ada pemanggilan saksi dan segala macam. Berita yang nggak sempat dibaca di hari sebelumnya, direspon oleh *Tempo* itu dengan membuat berita-berita dalam skala harian. Koran *Tempo*, dulu namanya Koran *Tempo*, kalau sekarang di *Tempo* Premium Harian. Nuansa yang ingin ditampilkan kepada pembaca adalah ingin memberikan semacam pemahaman yang utuh kepada pembaca atas peristiwa yang berlangsung seharian itu. Dan kemudian memberikan perspektif isu yang tepat terhadap peristiwa itu sendiri. Lewat angle-angle tertentu. Pemilihan angle berita itu kan selalu berangkat dari sebuah pertanyaan. Misalnya, mengapa KPK membidik, mengapa Syahrul Yasin Limpo jadi tersangka kasus korupsi. Itu akan dijelaskan dalam satu penjelasan. Sementara kalau majalah, karena dia terbit secara reguler setiap pekan, maka tentu saja ada semacam kebutuhan di internal *Tempo* sendiri juga untuk menciptakan berita yang lebih dalam, lebih in-depth, dan lebih investigatif. Kenapa harus seperti itu? Karena pilihan itu adalah pilihan yang paling strategis kalau kita mau dibaca, kalau artikel kita itu mau diapresiasi, dibaca oleh para pembaca. Kalau mereka hanya mengonsumsi berita-berita yang terkompilasi selama tujuh hari, buat apa? Nggak ada unsur kebaruan. Basi lah istilahnya. Ini kan gue udah pernah baca di *Tempo.co*. Ini gue udah pernah baca di Koran *Tempo*. Karena itulah kemudian majalah itu punya pendekatan yang berbeda ketika membungkus sebuah peristiwa dan memberitakannya dalam sebuah artikel liputan, entah itu di laporan utama, laporan panjang. Itu selalu punya nuansa in-depth dan investigatif. Ada temuan-temuan yang kita usahakan semaksimal mungkin bahwa ini nggak akan ditemui oleh para pembaca di media manapun. Cuma kita yang dapat.

D. Pertanyaan Mengenai Berita Kasus Korupsi Kementerian Pertanian

1. Bagaimana *Tempo* menentukan pemilihan dan penonjolan isu utama dalam pemberitaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian? Apakah ada faktor

pertimbangan tertentu? Jawaban : Kalau penonjolan itu tentu kita pasti akan lebih selektif memilih isu apa yang kira-kira temuannya paling menohok. Kalau di temuan-temuan awal ketika kasus itu menjadi sorotan di KPK, si Syahrul Yasin Limpo jadi tersangka, orang pasti akan bertanya-tanya di mana letak kesalahannya Syahrul. Jadi petunjuk apa yang diperoleh oleh KPK saat itu hingga sampai pada kesimpulan untuk menetapkan status tersangka dan kemudian berujung pada penahanan yang bersangkutan. Itu kan pertanyaan yang pasti muncul bukan semata-mata apa yang menjadi *screening* dan kepentingan *Tempo*, tapi pembaca di luar sana juga pasti akan memiliki pertanyaan yang sama. Nah media, termasuk *Tempo*, kemudian memiliki *concern* juga untuk melayani rasa ingin tahu orang di luar sana tentang isu itu. Kalau kemudian lantas berkembang, katakanlah berita itu kan selalu berkembang, nggak hanya selesai dengan satu artikel kemudian selesai. Jika kemudian hari, katakanlah ada temuan baru, ada petunjuk baru, ada konfigurasi persoalan atau konfigurasi penyidikan, penerbitan Sprindik baru, tentu itu kemudian akan jadi perhatian juga untuk media, termasuk *Tempo*, untuk memberitakan itu. Tiba-tiba kita dapat petunjuk bahwa di rumahnya si SYL itu ternyata ditemukan beberapa duit, ada catatan transaksi, yang itu belum sempat kita beritakan. Berarti nanti *heavy* pemberitaannya itu akan mengolah soal temuan-temuan hasil penggeledahan, soal uang-uang di rumah itu, itu sumbernya dari mana, mau diperuntukkan sebagai apa, dan lain-lain. Jadi tergantung dari peristiwanya sendiri.

2. Analisis teks yang saya lakukan pada *define problems* dan *diagnose causes* di salah satu pemberitaan Majalah *Tempo* menunjukkan bahwa terdapat adanya nuansa politis yang dibingkai oleh *Tempo*. Bagaimana pandangan *Tempo* mengenai temuan analisis teks saya? Apa pertimbangan *Tempo* memilih tema tersebut sebagai *define problems*? Jawaban : Persis. Jadi proses hukum itu tidak lepas dari konfigurasi politik skala nasional yang saat itu lagi panas-panasnya. Jadi kasus SYL tidak bisa dibaca secara persentase kalo untuk melihat masalah korupsinya aja. SYL ini salah satu tokoh dari NasDem yang menjadi sorotan penegak hukum diluar itu ada Johny G. Plate, kenapa mereka jadi target? Jadi itu menjadi kritiknya *Tempo* terhadap penegakan hukum saat itu. Bahwa perkara ini adalah penegakan hukum, yang perkaranya memperlihatkan adanya skandal oleh pejabat negara terkait pengelolaan anggaran, suap, dan lain-lain. Juga bukan pilihan yang sepatutnya diapresiasi, karena penegak hukumnya juga tidak pas

dan steril dari intervensi politik. Ada nuansa, ketika itu, bahwa proses hukum yang terjadi di Kejaksaan, di polisi, maupun di KPK itu memang, operasi untuk menyandera tokoh-tokoh tertentu dari partai politik, yang bersebarangan dengan rezim saat itu. Itu juga bagian dari kritik kita. Kalo kamu perhatikan, penetapan status tersangkanya Plate itu kan nggak lama dari Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden. Padahal Ganjar adalah seseorang yang digadag-gadang oleh presiden saat itu, ada peristiwa apa saat itu? Kalo kamu mengikuti pemberitaan *Tempo* secara intensif, pasti kamu akan menemukan konflik-konflik, gesekan antara Jokowi, dan Megawati, dan lain-lain gitu.

3. Kemudian, analisis teks pada *make moral judgement* menunjukkan bahwa penilaian moral tidak hanya diarahkan pada Syahrul Yasin Limpo, melainkan juga KPK, bahkan juga Partai NasDem. Bagaimana pandangan *Tempo* mengenai temuan analisis ini? Apakah kecenderungan moral judgement tersebut memang sengaja dibuat seperti itu? Lalu bagaimana redaksi melihat peran media dalam membentuk nilai moral publik melalui pemberitaan kasus korupsi seperti ini? Jawaban : Pertama, kalau soal *moral judgment* itu sebenarnya wilayah yang ada di wilayah pembaca. Dunia persepsi yang ada pada pikiran pembaca. Tapi percaya, ketika misalnya kita mengekspos sebuah peristiwa, orang-orang di luar sana nggak perlu diajarin, nggak perlu dikuliahin, kita nggak perlu berperan sebagai guru untuk mengatakan bahwa ini bejat. Korupsi dengan sendirinya akan mencip masyarakat di luar sana akan sudah punya kecerdasan. Untuk menilai bahwa ini adalah perilaku yang nggak pantas, nggak patut, salah, bejat, gitulah. Nggak perlu kita, media memposisikan diri sebagai sumber moralitas gitu loh. Bukan itu yang menjadi orientasi dalam bermedia, meskipun orang-orang di internal *Tempo* memiliki frame dalam melihat aspek moralitas itu sendiri, tapi itu bukan dasarnya. Bukan menjadi nilai utama lah dalam membuat berita. Nggak penting menjadi penjaga moral, jadi tugas ustad kyai aja lah itu.
4. Dalam beberapa berita, rekomendasi penyelesaian disampaikan secara implisit maupun eksplisit. Apakah treatment recommendation tersebut merupakan bagian dari strategi redaksional untuk mendorong tindakan tertentu dari pihak berwenang atau publik? Lalu bagaimana *Tempo* memposisikan diri dalam memberi arah penanganan isu korupsi melalui pemberitaan? Jawaban : Kalo eksplisit dan implisit. Jadi gini ada larangan dan ada kelonggaran yang dimiliki media untuk beropini. Berita sebuah artikel entah di platform apapun baik itu di

online, di cetak itu ya. Itu haram opininya untuk beropini. Kita tidak boleh tuh mencampur adukkan. Bahkan pemilihan diksi saja sudah mempengaruhi ada wilayah opini atau enggak. Itu bisa menjadi permasalahan serius di dewan pers jika bersengketa. Tapi ada ruang tertentu yang memungkinkan berdasarkan aturan, yang dimungkinkan menurut aturan, membuat media itu bisa mengungkapkan *standing position*, penilaian terhadap masalah itu. Dimana itu? Ya di rubrik tajuk. Di rubrik opini. Media mau menilai dengan cara apapun ya bebas. Memang itu ruang yang diatur oleh kode etik.